1202059

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK

2022

BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK

2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pusat Statistik Tahun 2022

No. Publikasi: 02100.2303
Katalog: 1202059

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman: xiv + 135 Halaman

Naskah:
Biro Perencanaan

Penyunting:
Biro Perencanaan

Desain Kover oleh:
Biro Perencanaan

Penerbit:
© BPS RI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan LKIP BPS Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama periode tahun 2022.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar BPS dapat mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Pimpinan BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 Februari 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

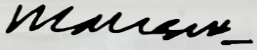

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar ix
Daftar Lampiran xi
Ringkasan Eksekutif xiii

01

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS 2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran 4
1.4. Potensi dan Permasalahan 6
1.5. Sistematika Penyajian Laporan 7

02

2.1. Visi dan Misi BPS 11
2.2. Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2022 13
2.3. Konsep dan Definisi IKU BPS Tahun 2022 15

03

3.1. Capaian Kinerja BPS 21
3.2. Capaian Kinerja Renstra BPS 35
3.3 Kegiatan Prioritas BPS 41
3.4 Prestasi BPS 49
3.5 Inovasi BPS 51
3.6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran 52

04

Kesimpulan 59
Rencana Tindak Lanjut 60

Lampiran 63

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Pagu Anggaran BPS Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2022 (Milyar rupiah) 5
2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPS 2022 14
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas" 23
4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN" 27
5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I" 30
6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan" 32
7. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022 35
8. Target Renstra 2022 dan 2024, Realisasi 2022, serta Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2022 dan 2024 37
9. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2022 (Milyar Rupiah) 52
10. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2022 53
11. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan TA 2022 54

12. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2022 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik 3
2. Komposisi SDM BPS Tahun 2022 Menurut Tingkat Pendidikan 4
3. Komposisi Pagu Anggaran BPS Tahun 2022 Menurut Program 5
4. Nilai Inti BPS 13
5. Capaian Kinerja BPS Tahun 2018-2022 21
6. Nilai Efisiensi Anggaran BPS Tahun 2019-2022 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 2022 63
2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 66
3. Jumlah Pegawai BPS Tahun 2022 68
4. Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2022 72
5. Pernyataan Telah Direviu 73
6. Daftar Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional Tahun 2022 74
7. Daftar K/L/D/I yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2022 82
8. Dokumentasi Pembinaan K/L/D/I Tahun 2022 84
9. Daftar K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar Tahun 2022 88
10. Daftar K/L/D/I yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral Secara Mandiri Tahun 2022 89
11. Daftar Prestasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2022 90
12. Daftar Inovasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2022 124
13. Dokumentasi Prestasi BPS Tahun 2022 130

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan empat tujuan yang harus dicapai BPS pada Tahun 2022.

Secara umum kinerja BPS periode tahun 2022 masih dalam kategori baik dengan kinerja sebesar 107,63 persen. Capaian kinerja tersebut meningkat dari tahun 2021. Seluruh sasaran dan IKU di dalamnya memiliki capaian kinerja sangat baik atau lebih dari sama dengan 100 persen kecuali IKU Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS dengan capaian 99,19 persen.

Perbandingan realisasi kinerja IKU BPS dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan pola yang meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan target di tahun akhir periode Renstra 2020-2024, sebanyak tiga IKU telah mencapai kinerja lebih dari 100 persen dan empat IKU lainnya telah mencapai kinerja lebih dari 70 persen.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2022 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.560,89 milyar dengan realisasi sampai dengan akhir periode TA 2022 sebesar Rp 8.311,12 milyar atau 97,08 persen. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran berasal dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp 5.334,75 milyar atau 64,19 persen dari total realisasi. Kontribusi lainnya berasal dari Program Dukungan Manajemen dengan realisasi sebesar Rp 2.976,37 milyar dengan kontribusi 35,81 persen.

1

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama periode tahun 2022.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki BPS adalah:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
    a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik; dan

b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS terdiri dari sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, BPS ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di 517 satuan kerja BPS se-Indonesia. Jika dilihat pada Gambar 2, kualitas pegawai BPS relatif semakin membaik. Dari total 16.826 pegawai, persentase SDM yang berpendidikan DIII ke bawah sebesar 25,76 persen, DIV/S1 sebesar 56,15 persen, S2 sebesar 17,66 persen, dan S3 sebesar 0,43 persen. Proporsi SDM yang berpendidikan DIII ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang semula 25,90 persen. Penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan komposisi SDM yang berpendidikan DIV/S1 yang berada pada angka 55,50 persen di tahun 2021. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan.

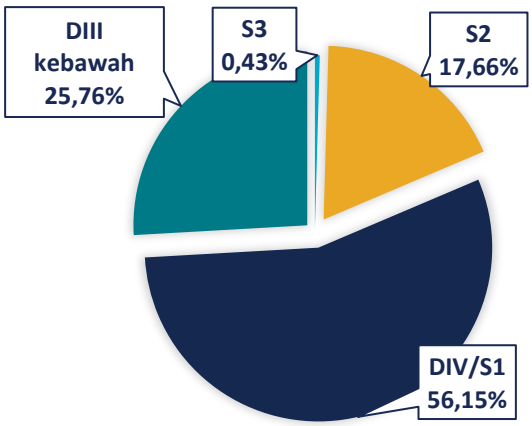

Gambar 2. Komposisi SDM BPS Tahun 2022 Menurut Tingkat Pendidikan

Selain mendidik calon pegawai melalui Politeknik Statistika STIS yang merupakan sekolah kedinasan milik BPS, peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar ataupun dengan memberikan ijin belajar bagi pegawai yang melanjutkan pedidikan dengan biaya mandiri.

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Tercatat sebanyak 9.479 pegawai atau sebesar 56,33 persen pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 8.591 pegawai atau mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya kebijakan perampingan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu serta penghapusan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat fungsional diperkirakan akan terus bertambah di tahun berikutnya. Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS sebesar 85, 01 persen di antaranya merupakan pejabat fungsional statistisi, 7,90 persen fungsional pranata

komputer, dan 7,09 persen pejabat fungsional lainnya. Telah terjadi kenaikan jumlah jenis jabatan fungsional yang lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pegawai yang menduduki jabatan fungsional di antaranya merupakan hasil program *inpassing* dan ujian kompetensi bagi pegawai.

Gambar 3. Komposisi Pagu Anggaran BPS Tahun 2022 Menurut Program

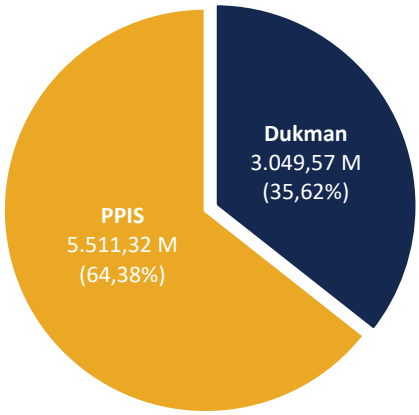

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022, BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.560,89 milyar. Pagu tersebut dibagi ke dalam dua program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 5.511,32 milyar dan Program non teknis/generik yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp 3.049,57 milyar. Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis belanja dan sumber dananya, pagu anggaran BPS tahun 2022 didominasi pada belanja pegawai dan belanja barang yang bersumber dari rupiah murni. Rincian Pagu anggaran BPS tahun 2022 menurut jenis belanja dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pagu Anggaran BPS Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2022 (Milyar rupiah)

Jenis Belanja	Rupiah Murni	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah Langsung Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pegawai	2.329,53	-	-	2.329,53
Barang	6.029,47	26,16	2,89	6.058,52
Modal	171,03	1,81	-	172,84
Total	8.530,03	27,97	2,89	8.560,89

1.4. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peran BPS sebagai lembaga statistik pemerintah telah ditopang oleh Politeknik Statistika STIS yang telah menghasilkan mahasiswa ahli statistik untuk memenuhi kebutuhan pegawai BPS serta K/L lain. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di K/L lain, sehingga memudahkan BPS dalam mewujudkan misinya menjadi pembina data dan juga pusat rujukan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BPS memiliki *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang telah tertanam pada diri ASN BPS. *Core value* ini yang telah menjadikan semangat insan BPS untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna data dasar.

Peran BPS semakin meningkat dan diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak luar negeri. Sebanyak 92,52 persen pengguna menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (Hasil SKD 2021). Selain itu, semakin banyak Instansi/Kementerian yang bekerja sama dengan BPS untuk menghasilkan data yang dibutuhkan, antara lain Bappenas, KemenPAN dan RB, Kementerian Pertanian, SDG's Indonesia, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Australian Bureau of Statistics (ABS) dan International Monetary Fund (IMF), G20, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa data BPS semakin dipercaya dan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.

Namun di sisi lain, BPS harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah karena kebutuhan data statistik semakin kompleks dan beragam bagi kinerja pemerintah dan pembangunan nasional. Terlebih bahwa Pemerintah Daerah sudah memiliki satuan perangkat pemerintah daerah urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data.

Selain peningkatan peran BPS sebagai pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah bagaimana cara meningkatkan serta

mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun survei kepuasan pengguna data BPS sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi namun BPS harus senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir seiring dengan terjadinya perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Prosedur penjaminan kualitas harus dapat diterapkan di semua kegiatan BPS secara bertahap, penerapan teknologi informasi sehingga data semakin cepat tersaji dan meminimalkan *error*/kesalahan data. Era *big data* tidak mungkin dihindari, oleh sebab itu BPS harus dapat mengikuti dan menggunakan data perkembangan global yang sangat cepat dengan menerapkan perangkat teknologi yang efisien, efektif serta ekonomis. Selain *big data*, perkembangan sumber data alternatif juga termasuk pemanfaatan data administratif dengan kualitas yang semakin baik.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah survei yang dilakukan BPS berdampak pada sedikit responden yang berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat responden bosan dan bahkan menolak untuk didata sehingga berdampak pada penurunan *response rate* atau tingkat pemasukan dokumen survei. Untuk itu diperlukan upaya untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan hasil akhir yang semakin kredibel, andal dan memberi manfaat bagi semua pengguna data.

Tantangan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah penguatan kolaborasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang efektif, efisien, dan andal. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi BPS sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Selain itu, dari sisi internal organisasi BPS juga menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kapabilitas organisasi, diantaranya: Perubahan budaya kerja yang agile, fleksibel, dan kolaboratif; Penyesuaian manajemen kinerja dan pembangunan manajemen talenta; Sistem kerja yang terintegrasi dan berbasis digital; serta Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; SDM dan dukungan anggaran; potensi permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi visi dan misi BPS; tujuan, sasaran dan target kinerja tahun 2022; serta konsep defisini IKU BPS tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja BPS, capaian Renstra BPS, realisasi dan efisiensi anggaran, prestasi, inovasi serta kegiatan besar BPS di tahun 2022.

Bab IV. Penutup

Bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi BPS

Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing". Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

("*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*")

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1 Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi. Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *The United Nations Fundamental Principles of Official Statistics (UNFOS)*.

2 Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dalam rangka mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3 Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4 Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Gambar 4. Nilai Inti BPS

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Nilai-nilai organisasi tersebut kemudian dilebur ke dalam *core value* ASN BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021. Insan BPS diharapkan dapat mencermati dan mengamalkan perilaku BerAKHLAK dalam melaksanakan amanah pekerjaannya serta mencerminkan *employer branding* Bangga Melayani Bangsa.

2.2. Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2022

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan target yang dapat dilihat pada Tabel 2. Tujuan, sasaran dan target kinerja BPS yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPS tahun 2022, didasarkan pada Perka BPS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perka BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPS 2022

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas		
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	95,00
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	78,00
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	35,00
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	68,00
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	38,00
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		
4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Opini	WTP
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98,00

2.3. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja Utama BPS Tahun 2022

Sasaran 1.1 "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas"

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 1.1. "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas", yaitu:

1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan BPS. Angka pada indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS yang dilaksanakan setiap tahun dan yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Kedeputian Metodologi dan Informasi Statistik.
Cara penghitungannya adalah:

$$P\ PMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$$

Keterangan

P PMEP : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

JPMEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS.

1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dan dimanfaatkan sebagai dasar p0erencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional. IKU ini bertujuan untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan. Angka pada indikator ini

bersumber dari data Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS dan data internal Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS. Yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, serta NAS.
Cara penghitungannya adalah:

$$P\ PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$$

Keterangan

P PbAS : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional.

JPbAS : Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional.

JPb : Jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I.

Sasaran 2.1 "Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN"

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 2.1. yaitu "Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)" dan "Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)" yang keduanya merupakan tanggungjawab Kedeputian Metodologi dan Informasi Statistik.

2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam merekomendasikan kegiatan statistik di K/L/D/I. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh K/L/D/I. Angka pada indikator ini bersumber dari Laporan dari Sistem Rekomendasi Statistik Direktorat Diseminasi Statistik BPS.
Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$$

Keterangan

P LmRS : Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

JLmRS : Jumlah K/L/D/I produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

JLR : Jumlah K/L/D/I produsen data yang menjadi target pembinaan.

2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan BPS sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksakanan K/L/D/I. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian BPS dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan penerapan standar kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I. Angka pada indikator ini bersumber dari Laporan *Monitoring* Metadata Statistik Sektoral BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan

P LmM : Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

JLmM : Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

JLs : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

Sasaran 3.1 "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I"

Hanya ada satu IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 3.1. yaitu "Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)". Seluruh kedeputian bertanggung jawab terhadap indikator ini.

3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. K/L/D/I dikatakan mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri jika K/L/D/I mampu menyelenggarakan minimal 1 kegiatan statistik sektoral mulai dari perencanaan, pendataan lapangan/ pencataan data administrasi, pengolahan data, hingga

penyusunan laporan/publikasi/rilis data. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. Angka pada indikator ini bersumber dari laporan kegiatan Kedeputian teknis BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan

P LmSS : Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%).

JLmSS : Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

JLs : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

Sasaran 4.1 "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan"

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 4.1 yaitu "Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS" dan "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)".

4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS.

Indikator ini merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dan bertujuan mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik. Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan secara profesional sebagai kesimpulan pemeriksa sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Inspektorat Utama. Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini BPK terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- Tidak Menyatakan Pendapat *(Disclaimer)* bobot 25
- Tidak Wajar *(Adverse)* bobot 50
- Wajar Dengan Pengecualian *(Qualified Opinion)* bobot 75
- Wajar Tanpa Pengecualian *(Unqualified Opinion)* bobot 100

Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100).

4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan statistik di BPS. Angka pada indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) dan Survei Kepuasan Konsumen BPS yang dilaksanakan setiap tahun dan yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Kesestamaan karena berhubungan dengan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BPS.
Cara penghitungannya adalah:

$$\%KPSP = \frac{\sum Ppuas}{\sum PBPS} \times 100\%$$

Keterangan

%KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%).

$\sum Ppuas$: Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

$\sum PBPS$: Jumlah pengguna data BPS.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS

Keberhasilan kinerja suatu instansi dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis capaian kinerja instansi sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi agar suatu instansi menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja BPS tahun 2022 merupakan rata-rata pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama periode tahun anggaran 2022. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang selaras dengan dokumen Reviu Rencana Strategis periode 2020-2024.

Gambar 5. Capaian Kinerja BPS Tahun 2018-2022

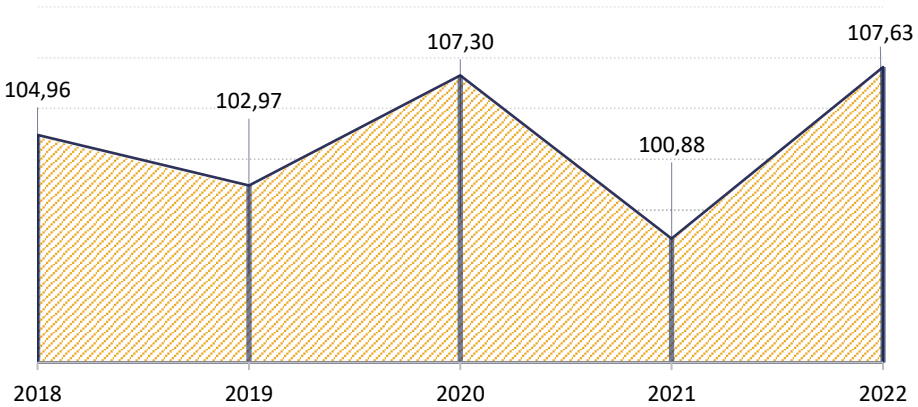

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, capaian kinerja BPS periode tahun 2018 hingga 2022 bergerak secara fluktuatif. Meski demikian, setiap tahun BPS selalu melebihi capaian kinerja 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai berhasil melebihi target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dapat dikatakan bahwa selama tahun 2018 hingga

tahun 2022 BPS tetap mampu mempertahankan kinerjanya meski menghadapi berbagai macam kendala. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan sebagai berikut:

1 Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Di dalam Perpres No. 86 tahun 2007 disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari juga semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*).

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga dan dunia usaha serta masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta rencana pembangunan. Hal ini menuntut BPS untuk terus meningkatkan kualitas data statistik terutama dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan oleh pemerintah.

Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas data statistik tersebut, BPS menuangkan ke dalam Tujuan Strategis pertama yaitu menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Tujuan pertama ini merupakan penjabaran misi BPS yaitu menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Terdapat dua IKU yang berkaitan dengan pemanfaatan data statistik dan mengukur SS1.1. Dari dua IKU tersebut, rata-rata capaian kinerja SS1.1 TA. 2022 adalah 111,26 persen karena realisasi kedua IKU berhasil melampaui target yang ditetapkan. Secara rinci target dan capaian kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas"

IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	95,00	97,39	102,52
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	78,00	97,98	120,00
Rata rata Capaian Kinerja			111,26

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Indikator "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" merupakan indikator pertama dari SS1.1. Indikator ini ditujukan untuk memotret kemampuan BPS untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional dari sudut pandang pengguna data. Pengukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2022 dengan sampel konsumen data yang berasal dari K/L/D/I yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS baik secara luring maupun daring.

Pada tahun 2022 ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 95 persen dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen reviu Renstra BPS Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil SKD Tahun 2022, diperoleh hasil persentase pengguna data dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 97,39 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 102,52 persen karena berhasil melampaui target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pengguna khususnya yang berasal dari lembaga/instansi pemerintah terhadap data dan informasi yang dihasilkan BPS sudah cukup tinggi. Tercapainya target indikator ini sedikit banyak dipengaruhi oleh telah dibukanya kembali Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS secara luring karena penurunan kasus Covid-19 yang signifikan.

Meskipun capaian indikator ini sudah memenuhi target, tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain: Terbatasnya data yang tersedia untuk penghitungan indikator di level BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga batas waktu rilis indiktor; Tantangan keragaman data khususnya dari sisi kelengkapan dan kemutakhiran data; serta Adanya ketidaksesuaian data yang tersedia dengan harapan pengguna data. Hal ini merujuk dari hasil SKD 2022, masih terdapat 9,85 persen pengguna data yang menyatakan bahwa data yang diperoleh dari PST BPS tidak sesuai, 2,49 persen data yang dicari tidak berhasil diperoleh, dan 6,46 persen pengguna data belum memperoleh data yang dicari.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS melakukan upaya berupa: Memperkuat koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah terkait penyediaan data yang digunakan untuk penghitungan indikator agar indikator dapat rilis tepat waktu; Melakukan modernisasi pengumpulan data statistik dengan cara pemanfaatan sumber data lain seperti data administrasi dan big data untuk menjawab tantangan keragaman data; dan Integrasi survei sebagai strategi perbaikan proses bisnis statistik dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dihasilkan BPS.

Selain itu sebagai bentuk rencana aksi tindak lanjut di periode yang akan datang BPS akan melakukan peningkatan kualitas penyediaan data BPS melalui perwajahan baru *website*, penyempurnaan pemberian pelayanan statistik baik secara *offline* maupun *online* melalui SILASTIK, penguatan kelembagaan BPS dan tata kelola statistik nasional melalui revisi UU No.16 Tahun 1997 tentang statistik dan penataan struktur organisasi BPS, serta perbaikan proses bisnis statistik di internal BPS melalui *rebasing* PDB, integrasi statistik, pemanfaatan big data sebagai *official statistics*.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Akurasi menjadi salah satu dimensi penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Data dengan akurasi tinggi berarti data tersebut dapat dipercaya dan mendekati kebenaran, atau dengan kata lain dapat mencerminkan fenomena yang sebenarnya terjadi. Indikator "Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" merupakan indikator kedua dari SS1.1 yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPS menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dan khususnya yang digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Pengukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2022 dengan menghitung jumlah publikasi BPS yang menerapkan standar

akurasi dan sekaligus dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan total seluruh publikasi BPS yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh pengguna data.

Pada tahun 2022 ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 78 persen dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam dokumen reviu Renstra BPS Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil SKD Tahun 2022, diperoleh jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebanyak 242 publikasi (terlampir). Sementara itu, dengan jumlah total seluruh publikasi BPS yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh pengguna data sebanyak 247 publikasi, diperoleh realisasi indikator Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 97,98 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 120 persen karena berhasil melampaui target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan menghasilkan publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat, dapat dikatakan bahwa BPS mampu menyajikan publikasi dengan kualitas data yang baik untuk disajikan kepada pengguna data khususnya pemerintah dalam melakukan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Meskipun sudah dihasilkan capaian kinerja yang sangat baik, pencapaian indikator ini tidak telepas dari kendala yang dihadapi. Penyusunan publikasi di BPS masih terhambat oleh jumlah SDM di daerah yang kurang memadai dan diiringi dengan jadwal pelaksanaan survei/sensus yang padat. Selain itu, koordinasi dalam penyusunan publikasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah masih belum optimal sehingga memengaruhi kualitas publikasi yang dihasilkan. Beberapa publikasi di level BPS Daerah juga mengalami tunda rilis dikarenakan data yang digunakan untuk penyusunan publikasi belum tersedia sampai tanggal rilis ditetapkan.

Untuk mengatasinya BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Dilakukan pula penguatan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah khususnya dalam penyusunan publikasi yang menerapkan standar akurasi serta melaksanakan penundaan rilis publikasi untuk publikasi yang datanya belum tersedia. Sebagai rencana aksi tindak lanjut kedepannya BPS juga perlu terus meningkatkan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS daerah dalam penyusunan publikasi serta memperbaiki kualitas publikasi dengan mempertajam analisis melalui metode *data story telling* sehingga publikasi tersebut diharapkan dapat memberi *insight* sebagai komitmen BPS dalam penyediaan *decision support*.

2 Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

BPS memiliki peran sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN serta sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS adalah sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Untuk mendukung peran dan fungsi tersebut BPS memiliki tujuan kedua Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

SS2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu "Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN". Terdapat dua IKU yang membangun sasaran tersebut, yakni "Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik" dan "Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar". Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja SS2.1 TA. 2022 tercapai sangat baik dengan rata-rata sebesar 105,85 persen. Secara rinci target dan capaian kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN"

IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	35,00	35,14	100,40
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	68,00	75,68	111.29
Rata rata Capaian Kinerja			105,85

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kemudian PP No 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik maka setiap K/L/D/I pemerintah yang akan melakukan kegiatan survei harus mendapatkan rekomendasi dari BPS terlebih dahulu. BPS akan melakukan telaah rencana teknis kegiatan survei yang akan dilakukan termasuk memberikan saran/masukan sesuai dengan kaidah statistik pemerintahan. Indikator ini digunakan untuk menangkap kemampuan BPS sebagai pembina kegiatan statistik dalam merekomendasikan kegiatan statistik di K/L/D/I.

Hasilnya, selama periode Januari hingga Desember 2022, dari 37 K/L/D/I yang menjadi target pembinaan terdapat 13 K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS atau sebesar 35,14 persen. K/L/D/I tersebut yakni: Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Komisi Informasi Pusat RI, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informasi nomor rekomendasi serta kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L/D/I terlampir di Lampiran 6. Dokumentasi beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan BPS terlampir di Lampiran 7.

Dengan menetapkan target sebesar 35 persen, maka BPS berhasil melampaui target dengan capaian kinerja 100,40 persen. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 27,27 persen. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan usaha optimal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik. Meski demikian, terdapat kendala yang dihadapi selama

melaksanakan IKU ini. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan K/L/D/I terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang rekomendasi kepada pihak internal BPS maupun Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak eksternal BPS.

Tentunya BPS telah mengupayakan yang terbaik dalam menjalankan perannya sebagai pembina kegiatan statistik dengan memberikan rekomendasi sesuai ketentuan. Capaian kinerja tersebut sudah dapat dikatakan baik namun hal ini tetap perlu dijadikan penyemangat bagi BPS kedepannya agar dapat melaksanakan perannya dengan lebih baik. Rencana tindak lanjut tahun 2023 agar dapat meningkat adalah dilakukannya upaya perbaikan berupa penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik untuk mendorong pengajuan rekomendasi kegiatan statistik serta meningkatkan kolaborasi dan memaksimalkan sarana dalam proses penyelenggaraan pembinaan statistik ke K/L/D/I agar menumbuhkan kesadaran akan kewajiban K/L/D/I dalam pengajuan rekomendasi kegiatan statistik.

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)

Indikator "Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar" masih selaras dengan indikator sebelumnya yakni berkaitan dengan pengaplikasian statistik yang tepat sebagai bentuk komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Indikator ini menangkap kemampuan BPS sebagai pembina kegiatan statistik dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksakanan K/L/D/I.

Hasilnya selama periode Januari hingga Desember 2022, dari 37 K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik 28 K/L/D/I atau 75,68 persen di antaranya telah menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Beberapa K/L/D/I tersebut yakni Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Artinya BPS telah mampu mencapai target indikator sebesar 68 persen sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 111,29 persen. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 56,32 persen. Meski demikian, BPS perlu meningkatkan upayanya sebagai pembina statistik sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi K/L/D/I yang dapat menyampaikan metadata sektoral sesuai standar sesuai dengan prinsip SSN. Daftar 28 K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar terlampir di Lampiran 8.

Target indikator ini dapat tercapai berkat adanya upaya sosialisasi yang dilakukan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik sehingga memacu peran aktif K/L/D/I dalam menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Terlepas dari tercapainya target yang ditetapkan, BPS masih menghadapi kendala dalam pemenuhan IKU yakni kendala teknis pada saat implementasi aplikasi pengelolaan metadata statistik yang baru. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem Indonesia Data Hub (INDAH). Untuk mengatasinya, pengembangan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada sistem Indonesia Data Hub (INDAH) terus dilakukan agar mempermudah pengguna K/L/D/I dalam menyampaikan metadata sektoral sesuai standar, sekaligus mempermudah pemeriksa metadata sektoral.

Selain itu upaya perbaikan harus terus dilakukan agar persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dapat terus meningkat dikemudian hari. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral serta meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada sistem Indonesia Data Hub (INDAH) akan terus dilakukan.

3 Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini diperkuat oleh penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *better, faster, and cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable* and *accountable*. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka

peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

SS3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Tujuan ketiga dicapai dengan beberapa arah kebijakan salah satunya adalah arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

Untuk mengukur sasaran ketiga ini, digunakan satu indikator yakni "Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri". Rincian target, realisasi, dan capaiannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I"

IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	38,00	49,00	120,00
Rata rata Capaian Kinerja			120,00

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. Hasilnya, dari 37 K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik, 18 K/L/D/I atau 49 persen di antaranya telah menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikatornya adalah 120 persen. Angka realisasi tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realiasi di tahun 2021

sebesar 29,89 persen. Daftar K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri terlampir di Lampiran 9.

BPS berhasil mencapai target yang ditetapkan berkat upaya meningkatkan kolaborasi dengan *subject matter* dalam rangka menjalankan fungsi BPS sebagai pembina data statistik yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif, baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I.

Kendala dalam perwujudan IKU ini yakni terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral yang memberi ruang gerak terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Solusi yang telah dilakukan yakni memanfaatkan anggaran secara efektif dengan menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral secara intensif dalam pertemuan luring dan meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan secara daring.

Sebagai upaya perbaikan kedepannya BPS akan terus meningkatkan upaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN diantaranya dengan cara meningkatkan kolaborasi dengan *subject matter* BPS dan meningkatkan perencanaan anggaran pada proses pembinaan sektoral secara menyeluruh di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga kedepannya akan semakin banyak lagi K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

4 Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Tujuan ini berkaitan dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih baik kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.

Sasaran "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan" diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) IKU yakni "Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS" dan "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS". Capaian kinerja sasaran ini masuk ke dalam kategori baik dengan rata-rata sebesar 99,60 persen. Penjelasan tentang capaian masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan"

IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP (100,00)	WTP (100,00)	100,00
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98,00	97,21	99,19
Rata rata Capaian Kinerja			99,60

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah termasuk BPS. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan BPS tersebut berdasarkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
3. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jumlah laporan keuangan tingkat satker, wilayah, dan instansi yang terbit tepat waktu selama tahun 2022 berjumlah 1.657 yang terdiri dari 552 laporan pada periode *unaudited* 2021, 1 laporan pada periode *audited* 2021, 552 laporan pada periode semester I tahun 2022, dan 552 laporan pada periode triwulan III tahun 2022. Laporan Keuangan dikirim secara berjenjang pada internal BPS dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan di akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa BPS memperoleh skor 100 atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, BPS mampu mempertahankan hasil penilaian WTP. Tentunya BPS akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun yang akan datang.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan yaitu proses adaptasi penggunaan sistem SAKTI, pelaksanaan rekonsiliasi, kurangnya kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan, serta kurangnya pemahaman operator/penyusun sehingga penyusunan laporan keuangan tidak maksimal. Atas kendala tersebut telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dan pembinaan penyusunan laporan keuangan secara daring yang diikuti oleh operator SAIBA untuk tingkat satker dan wilayah. Selanjutnya perlu dilakukan rekonsiliasi ulang untuk hasil LK yang lebih baik.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Keberhasilan BPS dalam meningkatkan kapasitas akses data dapat diukur melalui IKU "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS". Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen penting dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengguna data.

Ukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2022. Hasilnya, dari seluruh konsumen data yang mengakses Pelayanan Statistik Terpadu (PST), sebanyak 97,21 persen di antaranya merasa puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Sayangnya, realisasi tersebut belum dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 98 persen. Sehingga, capaian kinerja indikator ini adalah 99,19 persen.

Meskipun targetnya belum tercapai, di tahun 2022 ini BPS telah berhasil meningkatkan kepuasan pengguna dari tahun 2021 yang semula 96,37 persen. BPS juga berupaya mewujudkan wajah baru pelayanan statistik BPS dengan berinovasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPS. Inovasi tersebut antara lain optimalisasi teknologi informasi, perubahan tampilan ruangan yang *fresh* dan menarik, maupun peningkatan fitur layanan dihadirkan pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

Tidak tercapainya target indikator salah satunya dapat disebabkan oleh penataan sarana prasarana perpustakaan dan PST yang belum selesai pada awal tahun serta kendala koordinasi dalam pengelolaan sarana prasarana TIK yang tidak langsung dikelola oleh Biro Umum. Selain itu, masih ditemukan kondisi sarana prasarana PST di beberapa satker BPS Daerah dalam kondisi rusak, ketersediaan fasilitas pelayanan belum memadai, serta *website* BPS sebagai salah satu pelayanan data BPS secara *online* masih belum terstandarisasi terkait master subyek dan ID wilayah sehingga menyulitkan dalam pencarian tabel-tabel statistik.

Meski demikian BPS telah berupaya mencari solusi dengan melakukan peningkatan kenyamanan sarana prasara berupa pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana kondisi rusak ringan/sedang dan penghapusan barang kondisi rusak berat; peningkatan fasilitas pelayanan PST seperti menyediakan ruang bermain anak, fasilitas untuk disabilitas, ruang laktasi, dan pemanfaatan dukungan teknologi untuk peningkatan pelayanan PST; serta melakukan pengembangan *website* BPS dengan perbaikan klasifikasi master subyek dan ID wilayah.

Kedepannya sebagai bentuk rencana aksi tindak lanjut BPS perlu meningkatan pelayanan PST BPS dengan menindaklanjuti hasil SKD 2022 terkait perbaikan atribut maupun sarana prasarana pelayanan serta meningkatan kualitas penyediaan data BPS melalui perwajahan baru *website*, penyempurnaan pemberian pelayanan statistik baik secara *offline* maupun online melalui SILASTIK. Lebih lanjut, promosi terkait produk dan kegiatan BPS di media sosial melalui Humas BPS terus digalakkan guna menjangkau pengguna data yang luas.

3.2. Capaian Kinerja Renstra BPS

Dokumen Renstra menyajikan visi, misi, tujuan, dan target sasaran strategis BPS yang di *breakdown* ke dalam periode jangka menengah lima tahunan. Dalam perjalanannya Renstra BPS mengalami perubahan di tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Kepala Nomor 4 Tahun 2022. Kinerja selama lima tahun tersebut dievaluasi setiap tahunnya untuk melihat perkembangan kinerja dan memproyeksikan keberhasilan pencapaian target di akhir tahun periode Renstra di tahun 2024. Pada Tabel 7 perbandingan realisasi kinerja tahun 2020-2022 terlihat secara keseluruhan sebagian besar IKU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan IKU 2.1, 2.2, dan 3.1 mengalami perubahan nomenklatur mengikuti Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan ketiganya mencapai target yang ditetapkan di 2022.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2022

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	92,93	92,52	97,39
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90,00	93,96	98,13
2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	71,43*	27,27*	35,14
2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	60,00*	56,32*	75,68
3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	30,00*	29,89*	49,00
4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	WTP
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	88,37	96,37	97,21

*masih menggunakan IKU lama sebelum Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022.

IKU "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" memiliki realiasi yang cukup tinggi di tahun awal periode dengan 92,93 persen. Kemudian di tahun 2021 realisasinya sempat menurun 0,41 persen akibat Covid-19 varian delta yang membawa Indonesia ke puncak pandemi. Hal tersebut menyebabkan kunjungan

langsung ke PST BPS dihentikan selama beberapa waktu sehingga mempengaruhi *response rate* SKD sebagai sumber penghitungan indikator ini. Sebagai solusinya, BPS memaksimalkan penggunaan PST daring serta Pencacahan *Online* agar meningkatkan tingkat respon dalam memberikan data. Upaya tersebut nampaknya membuahkan hasil dan didorong pula dengan dibukanya kembali PST secara luring karena penurunan kasus Covid-19 yang signifikan, maka realisasi IKU ini kembali meningkat dengan signifikan di tahun 2022 ke angka 97,39 persen. Peningkatan kualitas data serta pelayanan PST diperlukan sebagai tindak lanjut optimalisasi capaian IKU di tahun berikutnya.

IKU "Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan angka 98,13 persen. Pencapaian indikator ini tidak telepas dari kendala terbatasnya kapasitas SDM dan diiringi dengan jadwal pelaksanaan survei/sensus yang padat. Untuk itu BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Sebagai tindak lanjutnya, BPS berupaya meningkatkan kapasitas SDM dengan mengadakan seminar/workshop terkait penulisan. Selain itu, BPS perlu memperluas cakupan data yang dihasilkan sehingga semakin banyak menjangkau kalangan pengguna data dan akhirnya dapat bermanfaat dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

IKU "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS" mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan angka 97,21 persen. Meski demikian pemenuhan IKU ini menemui kendala penataan sarana prasarana perpustakaan dan PST yang belum selesai pada awal tahun serta masih ditemukan kondisi sarana prasarana PST di beberapa satker BPS Daerah dalam kondisi tidak optimal. Untuk mengatasinya, dilakukan solusi peningkatan kenyamanan sarana prasara dengan berupa pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, peningkatan fasilitas pelayanan PST seperti menyediakan ruang bermain anak, fasilitas untuk disabilitas, ruang laktasi, dan pemanfaatan dukungan teknologi untuk peningkatan pelayanan PST. Sebagai rencana aksi tindak lanjut BPS perlu meningkatan pelayanan PST BPS dengan menindaklanjuti hasil SKD 2022 terkait perbaikan atribut maupun sarana prasarana pelayanan serta meningkatan kualitas penyediaan data BPS melalui perwajahan baru *website*, penyempurnaan pemberian pelayanan statistik baik secara *offline* maupun *online* melalui SILASTIK. Lebih lanjut, promosi terkait produk dan kegiatan BPS di media sosial melalui Humas BPS terus digalakkan guna menjangkau pengguna data yang luas.

Tabel 8. Target Renstra 2022 dan 2024, Realisasi 2022, serta Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2022 dan 2024

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Renstra 2022	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capkin thd target 2022 (%)	Capkin thd target 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas						
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	95,00	100,00	97,39	102,51	97,39
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	78,00	86,00	97,98	120,00	113,93
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN						
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	35,00	45,00	35,14	100,40	78,08
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	68,00	76,00	75,68	111,29	99,58
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I						
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	38,00	46,00	49,00	120,00	106,52
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Skor	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98,00	99,00	97,21	99,19	98,19

Tabel 8 pada halaman 36 menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2022 dan 2024 sehingga didapatkan capaian kinerja terhadap target tahun 2022 dan 2024. Informasi capaian kinerja terhadap target Renstra 2022 menggambarkan keberhasilan kinerja di tahun berjalan 2022. Sedangkan informasi capaian kinerja terhadap target Renstra di tahun 2024 memberikan gambaran perkembangan pencapaian target jangka menengah di akhir periode Renstra 2020-2024. Secara keseluruhan hampir semua IKU BPS dapat mencapai target Renstra 2022. Beberapa IKU bahkan mencapai capaian 120 persen.

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Berdasarkan hasil SKD Tahun 2022, realisasi Indikator "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" adalah sebesar 97,39 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 102,51 persen terhadap target Renstra tahun 2022. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa di tahun 2022 BPS sudah berhasil menyediakan data yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 97,39 persen. Hasil positif ini menjadi pemicu semangat BPS untuk lebih baik lagi memenuhi target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 100 persen. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Realisasi Indikator "Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional" pada tahun 2022 sebesar 97,98 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2022 sebesar 120 persen. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa BPS mampu menyajikan publikasi dengan kualitas data yang baik untuk disajikan kepada pengguna data khususnya pemerintah dalam melakukan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 113,93 persen. Artinya BPS telah berhasil memenuhi target

akhir Renstra 2024 sebesar 86 persen. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2022. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Realisasi Indikator "Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)" pada tahun 2022 sebesar 35,14 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2022 sebesar 100,4 persen. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan usaha optimal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 78,08 persen. Dengan capaian tersebut BPS masih mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan lebih baik lagi terhadap K/L/D/I agar dapat memenuhi target 45 persen di tahun 2024. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)

Realisasi Indikator "Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)" pada tahun 2022 sebesar 75,68 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2022 sebesar 111,29 persen. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dalam menerapkan standar kegiatan statistik yang akan dilaksanakan. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 99,58 persen. Dengan capaian tersebut BPS masih mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan lebih baik lagi terhadap K/L/D/I agar dapat memenuhi target 76 persen di tahun 2024. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)

Realisasi Indikator "Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%) pada tahun 2022 sebesar 49 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2022

sebesar 120 persen. Dengan kata lain, BPS berhasil mencapai target yang ditetapkan dan berhasil menjalankan fungsi BPS sebagai pembina data statistik yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif, baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I.

Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 106,52 persen. Dengan capaian tersebut, artinya BPS telah berhasil memenuhi target akhir Renstra 2024 yang sebesar 38 persen. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2022. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Realisasi Indikator "Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK" pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu WTP. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan akuntabilitas keuanga. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 juga sudah memenuhi target WTP. Tentunya BPS akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Realisasi Indikator "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)" pada tahun 2022 sebesar 97,21 persen. Sayangnya, realisasi tersebut belum dapat melampaui target Renstra 2022 yang ditetapkan sebesar 98 persen. Sehingga, capaian kinerja indikator ini adalah 99,19 persen. Jika mengacu pada realisasi tahun 2022, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 98,19 persen. Dengan capaian tersebut BPS masih mempunyai tugas untuk meningkatan pelayanan PST BPS dengan menindaklanjuti hasil SKD 2022 terkait perbaikan atribut maupun sarana prasarana pelayanan serta meningkatan kualitas penyediaan data BPS agar capiaan indikator ini mencpaai target Renstra tahun 2024 sebesar 99 persen pengguna data merasa puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan di BPS. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

3.3. Kegiatan Prioritas BPS

Beberapa kegiatan prioritas BPS di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Salah satu prioritas kegiatan BPS dalam Buku Arah Perubahan BPS untuk menunjang Reformasi Birokrasi di BPS adalah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tujuan dilaksanakannya EPSS adalah:

- Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistikpada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Dari sisi dukungan landasan hukum pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral juga sudah berhasil disusun dan sudah diundangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik tentang EPSS disebutkan bahwa pelaksanaan EPSS dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sedangkan ujicoba dilaksanakan paling lama empat bulan setelah diundangkan tanggal 30 September 2022. Oleh karena itu, BPS sebagai Badan yang melaksanakan evaluasi harus melaksanakan uji coba EPSS di tahun 2022.

Pada tahun 2022 telah ditentukan beberapa target aktivitas yang akan dicapai sampai akhir tahun 2022. Aktivitas-aktivitas tersebut, meliputi: penyusunan instrumen EPSS, penyiapan aplikasi Simbatik, pelatihan tim penilai badan (TPB), penyusunan dan pengesahan Peraturan Badan tentang EPSS, sosialisasi EPSS kepada K/L/D/I, pelaksanaan penilaian mandiri K/L/D/I, penilaian dokumen, penilaian interviu dan visitasi, penjaminan kualitas, pleno hasil EPSS nasional, penyusunan hasil rekomendasi hasil EPSS, dan penyerahan *award* EPSS kepada K/L/I/D. Namun pada prakteknya karena terkendala beberapa hal maka Sampai dengan tahun 2022 tahapan kegiatan yang dicapai seperti: Penyusunan instrumen EPSS, Pelatihan Tim Penilai Badan (TPB), Penerbitan Perban BPS tentang EPSS, Sosialisasi Perban kepada K/L/Pemda, dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri K/L/Pemda.

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)

Program Desa Cantik adalah program pembinaan statistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan komprehensif. Program ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa desa yang tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Desa Cantik tahun 2022 merupakan kelanjutan Program Desa Cantik tahun 2021. Pada tahun 2022, Eskalasi Program Desa Cantik dengan menambahkan satu desa binaan di tiap kabupaten/kota, selain 100 desa cantik terpilih dan 177 desa tambahan tahun 2021. Terjadi *shifting* penanggung jawab Program Desa Cantik dari Biro Perencanaan ke Direktorat Ketahanan Sosial. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan *knowledge transfer* antara Biro Perencanaan (Tim RB) kepada Tim Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tentang pengelolaan Program Desa Cantik serta rapat pembahasan *draft* KAK dan RAB Program Desa Cantik 2022. Pengelolaan Desa Cantik di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga tetap melibatkan Tim Transformasi Statistik dalam hal penyusunan *draft* Perka Desa Cantik, penyusunan instrumen penilaian Desa Cantik dan berpartisipasi dalam penilaian Desa Cantik seperti *desk evaluation* dan *field evaluation*.

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)

Industri pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama kemajuan sosio ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur.

Maksud dan tujuan pelaksanaan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional adalah untuk mendukung tersedianya data statistik berkualitas khususnya di sektor pariwisata. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan data industri pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. TSA sendiri berbentuk *full set* neraca yang menjelaskan berbagai data dan indikator pariwisata yang terkait satu sama lain. Melalui neraca-neraca TSA tersebut dapat dihitung nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional yang menggambarkan kinerja sektor tersebut dalam ekonomi Indonesia serta sumber-sumber pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Selain itu, neraca-neraca TSA juga menjelaskan data supply dan demand

pariwisata yang konsisten antar-neracanya, sebagaimana direkomendasikan oleh manual internasional. *Output* dari kegiatan ini berupa Laporan Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) Indonesia.

Tahapan kegiatan ini mencakup penentuan klasifikasi dan cakupan industri serta produk pariwisata yang sesuai dengan rekomendasi internasional. Selanjutnya adalah pengumpulan data dasar, seperti pengeluaran wisatawan dan output industri pariwisata. Tahapan ini juga mencakup pengumpulan fenomena kualitatif yang dilakukan melalui *indepth study* guna mendapatkan penjelasan pada setiap perkembangan data yang didapatkan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah kompilasi dan penyusunan naraca-neraca TSA, hingga akhirnya penyusunan tabel-tabel sesuai rekomendasi internasional. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan yang menjelaskan seluruh runtutan tahapan-tahapan tersebut.

Kendala yang dihadapi adalah kegiatan pengumpulan data dan fenomena pariwisata khususnya terkait kegiatan pariwisata domestik. Selain itu, kerangka kerja utama, yakni *Supply and Use Table* (SUT) belum tersedia secara *series*. Di samping itu, ketersediaan data pengeluaran wisatawan tahun 2021 sempat tertunda. Berbagai hal tersebut mengakibatkan proses rekonsiliasi *supply* dan *demand* pariwisata tidak berjalan efisien serta menghambat penyusunan estimasi kontribusi pariwisata. Diskusi penyelarasan data *supply* dan *demand* pariwisata perlu dilakukan lebih intens sehingga didapatkan kondisi *supply* dan *demand* pariwisata yang selaras. Selain itu, komunikasi dengan penyedia data, khususnya data pengeluaran wisatawan perlu dilakukan lebih intens sehingga penyusunan estimasi kontribusi pariwisata dapat berjalan lebih efektif. Kendala lainnya yang turut berdampak dalam proses penyusunan TSA Indonesia adalah adanya kegiatan-kegiatan tambahan (*adhoc*) yang berlangsung di akhir tahun, diantaranya adalah penyelenggaraan pendataan Regsosek di akhir tahun 2022. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan *indepth study* TSA terganggu sehingga *input* data dalam penyusunan *supply* pariwisata turut terganggu.

Analisis Tematik Kependudukan (Analisis Mendalam Hasil Long Form)

Analisis mendalam hasil SP2020 tidak hanya disajikan untuk tingkat nasional, tetapi juga dilakukan untuk level provinsi. Kegiatan analisis tematik kependudukan tahun 2022 meliputi *Workshop* Analisis Tematik Kependudukan Nasional Dan Provinsi, Analisis Tematik Kependudukan Nasional, dan Analisis Tematik Kependudukan Provinsi. Cakupan materi Analisis Tematik Kependudukan Provinsi hasil SP2020 adalah seluruh indikator yang dihasilkan dari SP2020 di masing-masing provinsi. Indikator-indikator tersebut meliputi informasi dasar penduduk seperti fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk, keadaan pendidikan, ketenagakerjaan

dan perumahan. Dengan menggunakan teknik statistik inferensia, akan diperoleh informasi mengenai berbagai keterkaitan indikator kependudukan dengan isu terkini dalam demografi seperti migrasi, perubahan struktur umur, fertilitas remaja, bonus demografi, dan lainnya. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Kerangka Publikasi Analisis Tematik Kependudukan Provinsi.

Dalam melakukan analisis tematik kependudukan provinsi, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. *Refocusing* anggaran menjadikan kegiatan-kegiatan konsultasi, diskusi menjadi terbatas. Diskusi bersama pakar dilakukan secara virtual dimana penyelenggara tidak bisa memantau tingkat keseriusan peserta selama mengikuti diskusi.
2. Data hasil Long Form SP2020 belum bisa tersedia hingga akhir tahun 2022 sehingga finalisasi analisis tidak bisa dilakukan.

Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050

Proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS2015 menjadi tidak relevan setelah BPS merilis jumlah penduduk hasil SP2020 sementara proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2020 masih menunggu estimasi parameter hasil Long Form SP2020. Untuk mengisi kekosongan itu, BPS merilis proyeksi penduduk interim periode Oktober 2020 sampai Desember 2023. Proyeksi penduduk interim ini disusun berdasarkan penduduk dasar hasil SP2020 dan menggunakan asumsi yang sama dengan yang digunakan dalam penyusunan proyeksi penduduk 2015-2045.

Dalam penyusunan proyeksi penduduk 2020-2050 berdasarkan hasil SP2020, BPS melakukan terobosan baru. Pertama, BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional dan provinsi menggunakan RUP dan model Bayesian. Model Bayesian digunakan sebagai *quality assurance* hasil penghitungan menggunakan RUP. Kedua, penghitungan proyeksi penduduk kabupaten/kota menggunakan RUP. Metode ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan parameter kelahiran, kematian dan migrasi yang selama ini tidak dapat diperoleh karena estimasi penduduk kabupaten/kota menggunakan metode geometrik. Kegiatan Perhitungan Proyeksi Penduduk Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Hasil SP2020 dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2023.

Rangkaian kegiatan Proyeksi Penduduk Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dimulai pada Januari 2022 dengan menyiapkan data-data dasar yang diperoleh dari Sensus Penduduk, SUPAS, dan SDKI. Persiapan dilakukan di awal tahun, baik dari segi data maupun sumber daya manusia/tim proyeksi melalui kegiatan *capacity building*. Persiapan ini dilakukan semaksimal mungkin, beriringan

dengan berjalannya kegiatan Long Form SP2020. Proses berlanjut dengan pembahasan input dan asumsi proyeksi penduduk serta *exercise* penghitungan. Perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan evaluasinya dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan November 2022, setelah data hasil Long Form SP2020 didapatkan. Rangkaian kegiatan Proyeksi Penduduk Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 diakhiri dengan draf buku Publikasi Proyeksi Penduduk yang akan dirilis pada Januari 2023.

Metropolitan Statistical Area (MSA)

Kegiatan perekonomian di kawasan metropolitan memengaruhi besaran kebangkitan ekonomi wilayah karena merupakan pusat pertumbuhan. Kontribusi PDRB metropolitan di Pulau Jawa terhadap nasional cukup tinggi jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB metropolitan di luar Jawa. Seluruh Wilayah Metropolitan di Jawa berkontribusi lebih dari sepertiga PDB dengan wilayah Jabodetabek sebagai kontributor terbesar yang menyumbang 17,31 persen PDB secara Nasional (BPS, 2019). Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, perlu dilakukan peningkatan peran kawasan metropolitan di Luar Jawa sebagai *growth centre*. Untuk itu, dibutuhkan data komprehensif yang meliputi analisis ekonomi dan keterkaitan kawasan dalam kawasan metropolitan.

Pada tahun 2022, sedianya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah mengevaluasi pola komuter di Wilayah Metropolitan (WM) Patungraya Agung dan Banjarbakula pasca pandemi, menerapkan survei digital sebagai metode penjaminan kualitas MSA MPD, memperbaiki metodologi serta analisis MSA MPD melalui pengumpulan informasi lapangan secara kualitatif, dan melakukan evaluasi metodologi serta analisis pemodelan MSA SAE. Namun mempertimbangkan dinamika perencanaan serta perubahan anggaran yang tersedia, maka diputuskan bahwa pada tahun 2022 hanya dilaksanakan evaluasi pola komuter menggunakan data MPD di WM Patungraya Agung dan Banjar Bakula. Pelaksanaan identifikasi pola komuter menggunakan data MPD di WM Maminasatta ditunda untuk selanjutnya akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 bersama WM Sarbagita.

Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Indonesia memiliki Program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, usaha dsb. Namun demikian, meskipun memiliki banyak program perlindungan sosial, target dan akurasi, serta cakupannya masih sangat rendah terutama disektor informal dan berpotensi tumpang tindih. Upaya pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat

mencakup seluruh keluarga di Indonesia dilakukan dengan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait untuk pelaksanaan tersebut. Pendataan data secara menyeluruh harus dilakukan dan secara bersamaan Kementerian/Lembaga, sehingga hasilnya menjadi kepemilikan bersama dan salah satu capaiannya akan percepatan penurunan tingkat kemiskinan [ekstrim] dengan penajaman ketepatan sasaran dari program-program bantuan sosial dan jaminan sosial.

Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dilaksanakan di bulan Juni 2022. Regsosek merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Pendataan Regsosek merupakan upaya pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial. Tujuan dari Pendataan Regsosek adalah untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan.

Survei Wisatawan Nusantara

Survei Wisatawan Nusantara bertujuan untuk mendapatkan data mengenai jumlah perjalanan, lama tinggal, jumlah pengeluaran, demografi, jenis akomodasi dan moda angkutan. Sejak tahun 2020, metode survei ini tidak lagi dengan survei konvensional, melainkan memanfaatkan *mobile positioning data* (MPD) dan survei digital yang terbukti mampu menangkap perjalanan wisatawan nusantara lebih akurat. Dengan memanfaatkan MPD, penghitungan jumlah perjalanan dan lama tinggal wisatawan nusantara (wisnus) bisa diperoleh data menurut kabupaten/kota asal, kabupaten/kota tujuan, dan bulanan seluruh Indonesia. Hasil profiling pelaku wisnus dari data MPD tersebut dipilih sampel untuk mendapatkan profil wisnus dan data pengeluaran selama berwisata melalui survei digital. Link kuesioner dikirimkan melalui sms ke responden terpilih, selanjutnya responden mengisi kuesioner secara online melalui link tersebut.

Tahapan kegiatan ini mencakup proses pengadaan koneksi mediasi data wisatawan nusantara berdasarkan data *mobile network operator*, pengolahan data MPD dan pelaksanaan survei digital. Selanjutnya penghitungan bobot dari data Susenas untuk memperoleh estimasi jumlah perjalanan wisnus, lama tinggal, dan pengeluaran. Output dari Survei Wisatawan Nusantara berupa publikasi Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2022.

Survei Wisatawan Mancanegara

Kegiatan pendataan survei Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dikenal di dunia Internasional dengan sebutan *Passenger Exit Survey* (PES), dikenal juga dengan sebutan *Dispatch Visitor Survey* (DVS). Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperoleh data pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia dan mendapatkan profil dan rute perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mendata di pintu keberangkatan internasional oleh petugas pendataan lapangan. Pendataan menggunakan metode CAPI sehingga entri data dilakukan langsung oleh petugas pendataan lapangan. Output dari *Passenger Exit Survey* (PES) berupa Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2022 dan Statistik Travel 2022 yang digunakan diantaranya untuk memenuhi keperluan kebijakan kepariwisataan yang diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain.

Pendataan Statistik *E-Commerce*

Pendataan *e-commerce* berbasis perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha *e-commerce* di Indonesia dari sudut pandang pelaku usaha/pengguna jasa *e-commerce*. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk melakukan pemutakhiran kerangka sampel usaha/perusahaan *E-Commerce* di wilayah yang terpilih sampel; menyediakan indikator pokok yang terkait dengan *e-commerce* (jumlah usaha, jenis barang dan jasa yang dijual, nilai transaksi, metoda pembayaran, serta cara pengiriman) yang merujuk pada konsep standar internasional; mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menyajikan nilai transaksi *e-commerce* di Era Digital. *Output* dari Survei *E-Commerce* berupa Publikasi Statistik *E-Commerce* dan kajian analisis peta *e-commerce* Indonesia dari hasil Big Data dengan "Teknik Crawling".

Persiapan Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dilakukan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA). Untuk memperoleh keterbandingan internasional, Sensus Pertanian dilaksanakan sedekat mungkin dengan tahun 2020.

ST2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian dan analisis data. Pada tahun 2022, telah dilakukan beberapan kegiatan dalam rangka persiapan ST2023, diantaranya gladi bersih I ST2023, gladi bersih II ST2023, Updating DPP dan DUTL, Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan (Kerangka Induk) ST2023, Uji Coba Daerah Kritis, Uji Coba Survei Ekonomi Pertanian, serta Monitoring Kualitas (MK) dan Post Enumeration Survey (PES) yang dilakukan pada gladi bersih.

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dilakukan untuk menyediakan data produksi tanaman pangan dan data pendukung lain terkait luas lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya mesin pertanian, serta data perbenihan. Data produktivitas diperoleh melalui Survei Ubinan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan area hasil pendataan KSA untuk padi dan pendekatan rumah tangga untuk palawija, dengan berdasarkan pengukuran langsung di lapangan. Sementara itu, data luas lahan menurut penggunaan, banyaknya alat atau mesin pertanian, informasi penggunaan pupuk dan benih diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) yang dilakukan secara lengkap di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia berdasarkan laporan Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD).

Tahapan kegiatan ini mencakup tahapan pemutakhiran (*updating*) rumah tangga untuk palawija dan tahapan pencacahan sampel rumah tangga padi dan palawija terpilih. Pemutakhiran rumah tangga bertujuan untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap dan mutakhir sekaligus mendapatkan informasi budidaya tanaman palawija yang akan digunakan sebagai kerangka sampel rumah tangga palawija. Pemutakhiran rumah tangga menggunakan daftar SUB-P dilakukan dengan mengunjungi data awal nama dan alamat rumah tangga yang tercetak hasil sensus/survei terakhir yang dilakukan di blok sensus tersebut. Pencacahan rumah tangga bertujuan untuk memperoleh data hasil ubinan dan keterangan lainnya pada petak terpilih. Rumah tangga yang tercantum pada Daftar SUB-DS untuk palawija dan SUB-KSA DS untuk padi dikunjungi untuk dilakukan wawancara secara langsung kepada petani atau anggota rumah tangga yang mengetahui tentang budidaya tanaman pangan. Pengukuran berat hasil panen dilakukan pada plot ubinan terpilih dan dicatat pada daftar SUB-S.

Output dari survei ini berupa publikasi Analisis Produktivitas Padi, Analisis Produktivitas Jagung dan Kedelai, Luas Lahan menurut Penggunaan, Publikasi Produksi Padi, dan Publikasi Produksi Palawija.

Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area

Dalam rangka memperbaiki akurasi dan aktualitas data, suatu sistem estimasi produksi padi yang lebih akurat, cepat dan obyektif sangat diperlukan. Dengan kemajuan teknologi *Geographic Information System* (GIS) dan penginderaan jauh, teknologi spasial diwujudkan dalam suatu sistem Kerangka Sampel Area (KSA) dan sistem komunikasi data dari lapangan ke pusat yang dibangun dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Android. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki akurasi dan aktualitas data estimasi luas panen padi sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, cepat, dan obyektif. Di samping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menghasilkan data potensi luas panen selama tiga bulan ke depan sebagai *early warning system*.

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan yang dilakukan oleh petugas pada 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada 5 (lima) hari pertama pada bulan selanjutnya. Data yang dihasilkan dari Survei KSA yaitu data luas tanaman padi menurut fase tumbuh tanaman (terutama luas panen padi untuk menghitung produksi padi). Hasil pendataan KSA dapat menyajikan data luas panen dan luas potensi panen pada 3 (tiga) bulan ke depan. Selain itu data hasil KSA disampaikan secara rutin kepada *stakeholders* terkait, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perekonomian, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Badan Intelijen Negara, serta beberapa direktorat di BPS. Adapun output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan KSA Padi dan KSA Jagung, BRS Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia (angka sementara dan angka tetap), publikasi Luas Panen dan Produksi Padi, dan publikasi Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi.

3.4. Prestasi BPS

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja BPS selama tahun 2022. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementrian dan lembaga atas kinerja BPS yang dianggap baik. Beberapa penghargaan tersebut antara lain:

1. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan meraih Peringkat Pertama Kategori Pelayanan Prima Kementerian Lembaga Umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB);
2. Sebanyak 6 Satuan Kerja (satker) Badan Pusat Statistik (BPS) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2022 yaitu BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten Jembrana, BPS Kota Tasikmalaya, BPS Kabupaten Boalemo, dan BPS Kabupaten Klungkung;
3. *Integrated Collection System* BPS meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik cluster Lembaga;
4. BPS menerima Anugerah Meritokrasi, penghargaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bagi instansi pemerintah, dengan predikat "Sangat Baik" dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
5. BPS meraih Penghargaan Terbaik Ketiga dalam *Indonesia's SDGs Action Awards* 2022 Kategori Kementerian/Lembaga;
6. BPS berhasil meraih predikat "Baik" bersama dengan 11 Lembaga Negara/LPNK/LNS lainnya pada Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengisian JPT;
7. BPS Raih Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman. BPS sebagai salah satu lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat berkomitmen pada perbaikan kualitas pelayanan publik baik di level pusat maupun daerah serta pencegahan malaadministrasi terus digiatkan oleh pemerintah;
8. Kepala BPS meraih Piala Adicita Sewaka Pertiwi dari KemenPAN dan RB. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala BPS sebagai pimpinan instansi yang berhasil mempertahankan predikat Pelayanan Prima dalam kurun waktu minimal 2 tahun berturut-turut;
9. Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021;
10. Penghargaan untuk BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dan KPPN;

    serta penghargaan lainnya terlampir.

3.5. Inovasi BPS

Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh BPS dalam rangka mendukung tercapainya kinerja selama tahun 2022 antara lain:

1. **Pembangunan Aplikasi KiPApp**
   KiPApp merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Aplikasi KiPApp membantu dalam perencanaan kinerja agar selaras dengan tujuan dan sasaran instansi serta memberikan informasi kinerja dari level unit kerja sampai dengan level pegawai di lingkungan BPS.

2. **Pengembangan Aplikasi Back Office Selindo**

   Back Office Selindo (BOS) adalah Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dalam menyertai siklus APBN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Terdiri dari modul Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi, secara simultan di tingkat pusat dan daerah (517 satker).

3. **Integrated Collecting System (ICS)**

   Integrated Collecting System (ICS) adalah sistem yang memfasilitasi pengumpulan data multimoda. Beberapa moda pengumpulan data, baik menggunakan kertas / Paper and Pencil Interview (PAPI), menggunakan smartphone / Computer Assisted Personal Interview (CAPI) maupun melalui website / Computer Assisted Web Interview (CAWI).

4. **Indonesia *Data Hub* (INDAH)**

   Indonesia *Data Hub* (INDAH) adalah tool orkestrasi data dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar data yang ada sehingga integrasi datapun dapat lebih mudah dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan data silo.

5. **SIGESIT**

   Direktorat Statistik Industri menginisiasi aplikasi Sigesit pada tahun 2022.

   Sigesit adalah aplikasi berbasis online yang berisi fitur-fitur (Monitoring, Neraca Komoditas, Neraca Energi dan Indikator SDGs) berkaitan dengan data-data energy secara nasional. Monitoring akan menampilkan persentase pemasukan data yang sudah terealisasi berbanding target, dari Instansi atau Kementerian/Lembaga yang terpilih sebagai pemasok data.

serta inovasi-inovasi lainnya terlampir.

3.6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, BPS menggunakan anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp 8.560,89 milyar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, total realisasi anggaran BPS sampai dengan akhir periode 2022 mencapai 8.311,12 milyar atau sebesar 97,08 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 96,77 persen.

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran BPS berasal dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp 5.334,75 milyar, kontribusinya terhadap total realisasi anggaran BPS sebesar 64,19 persen. Kontribusi lainnya berasal dari Program Dukungan Manajemen dengan realisasi sebesar Rp 2.976,37 milyar, kontribusinya mencapai 35,81 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2022 (Milyar Rupiah)

Program	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)	Kontribusi thd Realisasi Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Dukman	3.049,57	2.976,37	97,60	35,81
06 PPIS	5.511,32	5.334,75	96,80	64,19
Total	8.560,89	8.311,12	97,08	100,00

Informasi realisasi anggaran digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran BPS sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan pagu di tahun berikutnya. Meskipun sudah dapat dikatakan baik, realisasi penyerapan anggaran tersebut masih belum maksimal. Hal tersebut utamanya disebabkan adanya tambahan anggaran yang berasal dari BUN untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi di Triwulan III. Selain itu, adanya *Automatic Adjustment* sebanyak dua kali di tahun 2022 membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan penyesuaian kembali dari perencanaan awal. Adapun BPS telah berupaya melakukan akselerasi realisasi anggaran untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi agar dapat diserap secara optimal sampai dengan akhir tahun 2022. BPS juga melakukan revisi anggaran sebagai bentuk penyesuaian kegiatan setelah dilakukannya *Automatic Adjustment*.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2022

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
Dukman	100,61	97,60
PPIS	110,84	96,80
Total	107,63	97,08

*capaian kinerja program = $\frac{\text{jumlah capaian kinerja indikator program}_i}{\text{jumlah indikator program}_i}$

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja BPS terhadap target setahun, Tabel 10 menunjukkan proporsi yang belum selaras dimana besarnya realisasi anggaran belum diiringi dengan capaian kinerja yang tinggi pula. Apabila dibandingkan proporsi keduanya yang berselisih tipis, persentase realisasi anggaran seluruhnya menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini mengindikasikan upaya penggunaan dana yang seefisien mungkin dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Sementara itu, kedua program mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021 yang memiliki capaian sebesar 97,61 persen untuk Program Dukman dan 103,15 persen untuk Program PPIS.

Untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dari sisi anggaran pada level Kegiatan dapat dicermati pada Tabel 11. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2022 menunjukkan bahwa 25 dari 26 atau sebesar 96,15 persen kegiatan yang ada di BPS memiliki capaian kinerja yang melampaui realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target. Bahkan 84,61 persen diantaranya memiliki capaian lebih dari 100 persen atau melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini meningkat dari tahun 2021 dengan 84 persen kegiatan yang memiliki capaian kinerja melampaui realisasi anggarannya. Kegiatan dengan selisih paling jauh antara capaian kinerja dengan realisasi anggarannya adalah kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut diakibatkan adanya pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS dari kegiatan transaksi data.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan TA 2022

Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	99,82	95,38
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	100,00	85,74
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	110,95	99,00
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	101,82	99,31
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	102,80	94,94
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	101,65	97,52
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	108,12	96,42
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	112,14	84,92
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	110,42	60,95
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	100,00	94,95
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	104,00	91,65
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	105,43	84,94
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	105,83	92,09
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	100,03	92,15
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	106,04	95,40
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	95,09	92,67
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	105,00	97,39
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	102,47	96,92
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	101,44	97,38
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	98,81	93,74
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	100,00	83,99
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100,00	96,63
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	97,74	99,12
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	105,42	99,08
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	100,98	98,69

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2022

	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Realisasi Anggaran (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	111,26	5.471,74	5.310,53	97,05
02	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	105,85	36,38	21,37	58,74
03	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	120,00	3,20	2,85	89,29
04	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	99,60	3.049,57	2.976,37	97,60

Tabel 12 menunjukkan hampir seluruh sasaran memiliki capaian kinerja di atas 100 persen yang artinya melebihi target yang ditetapkan. Meskipun sasaran 4 belum tepat memiliki capaian yang maksimal namun capaian kinerjanya sudah tinggi sebesar 99,60 persen. Realisasi anggaran per sasaran menunjukkan realisasi yang cukup tinggi untuk sasaran 1, 3, dan 4. Sedangkan sasaran 2 memiliki realisasi anggaran yang rendah karena dipengaruhi salah satunya oleh realisasi anggaran kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik. Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran menurut sasaran menunjukkan pola yang selaras dimana besar realisasi anggaran hampir selalu diiringi dengan capaian kinerja sasaran yang besar pula. Secara keseluruhan sasaran memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target.

Gambar 6. Nilai Efisiensi Anggaran BPS Tahun 2019-2022

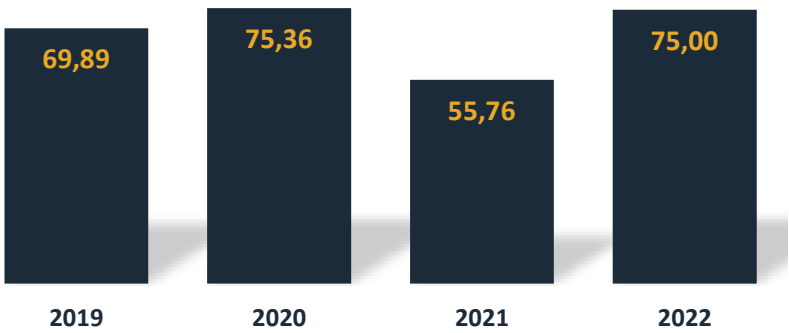

Sesuai dengan rumus perhitungan nilai efisiensi anggaran yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, didapatkan nilai efisiensi BPS tahun 2019 sampai 2022. Gambar 6 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dimana nilai efisiensi anggaran sempat meningkat di tahun 2020 namun menurun di tahun 2021 dan kembali meningkat di 2022. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada capaian kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Rumus penghitungan nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((AAi \times Ci) - RAi)}{\sum_{i=1}^{n} AAi} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Keterangan

E : efisiensi
AA : alokasi anggaran
RA : realisasi anggaran
C : capaian kinerja
NE : nilai efisiensi

4

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas data statistik, BPS terus berupaya meningkatkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis. Kinerja BPS pada tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja sasaran sebesar 107,63. Angka tersebut merupakan capaian paling tinggi yang berhasil diperoleh BPS dari tahun 2018 hingga 2022. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti jumlah SDM dan sarana prasarana yang terbatas, kurangnya kepatuhan K/L/D/I terhadap rekomendasi dan metadata, transisi penggunaan aplikasi SAKTI dalam perencanaan dan penganggaran, dan alokasi anggaran yang terbatas. Namun atas arahan dan evaluasi pimpinan secara komprehensif, kendala-kendala tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja BPS secara signifikan.

Jika dilihat dari sisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai BPS, capaian kinerjanya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, memiliki satu sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 111, 26 persen.

2. Tujuan kedua yaitu meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, memiliki satu sasaran strategis penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 105,85 persen.

3. Tujuan ketiga yaitu meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, memiliki satu sasaran strategis penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 120 persen.

4. Tujuan keempat yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, memiliki satu sasaran strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 99,60 persen.

Dengan capaian kinerja tersebut, realisasi anggaran sebesar 97,08 persen dari total pagu 8,5 triliun rupiah menggambarkan kemampuan BPS melakukan efisiensi dengan nilai efisiensi sebesar 75 persen.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Di sisi lain pencapaian pada tahun berikutnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan media sosialisasi BPS terutama terkait produk dan layanan data melalui PST maupun PST Online agar jumlah pengunjung dan pengguna data meningkat.

2. Mengoptimalkan pencacahan Survei Kebutuhan Data secara dokumen maupun website agar response rate meningkat.

3. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk mengurangi beban kerja pegawai sehingga capiaan kegiatan prioritas menjadi lebih optimal.

4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada K/L/D/I maupun OPD tentang kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS dalam rangka meningkatkan kolaborasi dengan K/L/D/I.

5. Melakukan pendampingan dalam penyusunan metadata sektoral sekaligus mengembangkan aplikasi pengelolaan metadata statistik pada Sistem Indonesia Data Hub (INDAH).

6. Meningkatkan kapabilitas SDM BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik sektoral secara menyeluruh dari level pusat hingga kabupaten/kota agar K/L/D/I mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

7. Meningkatkan pembinaan operator keuangan dan meningkatkan kualitas rekonsiliasi keungan agar hasil Laporan Keuangan yang lebih baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 19 Januari 2022
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PUSAT STATISTIK

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	95
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	78
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	35
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	Persen	68
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	38
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Skor	WTP
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.059.881.930.000,-
2.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	2.631.934.730.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**5.691.816.660.000,-**

Surabaya, 19 Januari 2022
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Lampiran 2.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas					
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	Tw I	0	0	0
		Tw II	0	0	0
		Tw III	0	0	0
		Tw IV	95,00	97,39	102,52
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	Tw I	0	0	0
		Tw II	0	0	0
		Tw III	0	0	0
		Tw IV	78,00	97,98	120,00
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	Tw I	16	16	100,00
		Tw II	22	30	120,00
		Tw III	27	32	120,00
		Tw IV	35,00	35,14	100,40
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	Tw I	5	3	60,00
		Tw II	12	3	25,00
		Tw III	34	22	63,59
		Tw IV	68,00	75,68	111,29

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I					
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	Tw I	6	6	100,00
		Tw II	14	49	120,00
		Tw III	26	49	120,00
		Tw IV	38,00	49,00	120,00
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Skor	Tw I	0	0	0
		Tw II	0	100,00	100,00
		Tw III	0	100,00	100,00
		Tw IV	WTP	WTP	100,00
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	Tw I	0	0	0
		Tw II	0	0	0
		Tw III	0	0	0
		Tw IV	98,00	97,21	99,19

Lampiran 3.

Jumlah Pegawai BPS Tahun 2022

Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	3	107	229	99	438
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	9	111	193	19	332
Deputi Bidang Statistik Sosial	7	90	92	9	198
Deputi Bidang Statistik Produksi	2	65	75	13	155
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	6	85	90	25	206
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	2	76	104	2	184
Inspektorat Utama		48	60	12	120
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	5	30	24	13	72
Politeknik Statistika STIS	21	60	19	9	109
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	2	51	323	160	536
BPS Provinsi Sumatera Utara		163	465	228	856
BPS Provinsi Sumatera Barat	1	81	290	103	475
BPS Provinsi Riau		47	259	96	402
BPS Provinsi Jambi		50	183	83	316
BPS Provinsi Sumatera Selatan	2	100	288	106	496
BPS Provinsi Bengkulu		50	187	43	280
BPS Provinsi Lampung		68	247	153	468
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		32	142	40	214
BPS Provinsi Kepulauan Riau		18	130	73	221
BPS Provinsi DKI Jakarta	1	57	102	54	214

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Jawa Barat		193	474	326	993
BPS Provinsi Jawa Tengah		303	617	480	1.400
BPS Provinsi D I Yogyakarta	1	130	120	53	304
BPS Provinsi Jawa Timur	2	269	561	360	1.192
BPS Provinsi Banten		77	136	100	313
BPS Provinsi Bali	1	52	155	51	259
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	41	235	93	370
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		35	322	191	548
BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	50	257	95	403
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	1	31	257	55	344
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	1	45	238	120	404
BPS Provinsi Kalimantan Timur	2	36	226	49	313
BPS Provinsi Kalimantan Utara		9	109	21	139
BPS Provinsi Sulawesi Utara		29	244	79	352
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		43	203	90	336
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	1	60	379	244	684
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		47	248	149	444
BPS Provinsi Gorontalo		14	141	40	195
BPS Provinsi Sulawesi Barat		34	117	54	205
BPS Provinsi Maluku		22	193	87	302
BPS Provinsi Maluku Utara		16	177	82	275
BPS Provinsi Papua Barat		21	200	63	284
BPS Provinsi Papua		25	336	113	474
Jumlah	73	2.971	9.447	4.335	16.826

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Jumlah Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2022

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	62	337	39		438
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	47	283	2		332
Deputi Bidang Statistik Sosial	48	150			198
Deputi Bidang Statistik Produksi	39	115	1		155
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	48	157	1		206
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	41	143			184
Inspektorat Utama	19	94	7		120
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	25	44	3		72
Politeknik Statistika STIS	38	66	5		109
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	43	398	95		536
BPS Provinsi Sumatera Utara	96	655	104	1	856
BPS Provinsi Sumatera Barat	49	384	42		475
BPS Provinsi Riau	35	317	50		402
BPS Provinsi Jambi	39	242	35		316
BPS Provinsi Sumatera Selatan	53	385	58		496
BPS Provinsi Bengkulu	29	225	26		280
BPS Provinsi Lampung	43	357	68		468
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29	162	23		214
BPS Provinsi Kepulauan Riau	18	163	40		221
BPS Provinsi DKI Jakarta	42	160	12		214
BPS Provinsi Jawa Barat	122	740	128	3	993
BPS Provinsi Jawa Tengah	173	1051	175	1	1.400
BPS Provinsi D I Yogyakarta	59	223	22		304
BPS Provinsi Jawa Timur	146	872	174		1.192
BPS Provinsi Banten	43	207	63		313

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Bali	31	202	23	3	259
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	33	283	54		370
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	34	383	128	3	548
BPS Provinsi Kalimantan Barat	47	313	43		403
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	26	285	33		344
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	36	306	62		404
BPS Provinsi Kalimantan Timur	30	260	23		313
BPS Provinsi Kalimantan Utara	12	116	11		139
BPS Provinsi Sulawesi Utara	25	287	39	1	352
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	29	245	62		336
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	59	480	143	2	684
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	30	344	70		444
BPS Provinsi Gorontalo	11	165	19		195
BPS Provinsi Sulawesi Barat	22	156	27		205
BPS Provinsi Maluku	19	232	51		302
BPS Provinsi Maluku Utara	15	202	58		275
BPS Provinsi Papua Barat	22	211	51		284
BPS Provinsi Papua	25	377	72		474
Jumlah	1.893	12.777	2.142	14	16.826

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

Lampiran 4.

Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2022

No	Jabatan Fungsional	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Statistisi	5	359	3.154	2.829	413	908	390	8.058
2	Pranata Komputer	1	47	470	204	2	18	7	749
3	Peneliti	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Perencana	-	3	11	9	-	-	-	23
5	Auditor	-	10	30	10	-	2	-	52
6	Widyaiswara	2	10	9	-	-	-	-	21
7	Analis Kepegawaian	-	5	68	14	1	7	4	99
8	Pranata Humas	-	3	10	8	1	-	-	22
9	Dokter	-	2	-	1	-	-	-	3
10	Dokter Gigi	-	2	-	-	-	-	-	2
11	Perawat	-	1	-	-	-	-	2	3
12	Perawat Gigi	-	-	-	-	1	-	1	2
13	Arsiparis	-	2	38	22	-	8	4	74
14	Pustakawan	-	-	3	-	1	2	-	6
15	Dosen	1	9	44	1	-	-	-	55
16	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1	-	2	-	-	-	3
17	Penerjemah	-	1	1	-	-	-	-	2
18	Penyuluh Hukum	-	-	4	4	-	-	-	8
19	Analis Anggaran	-	1	26	-	-	-	-	27
20	Analis Pengelolaan Keuangan Apbn	-	3	51	7	-	-	-	61
21	Apoteker	-	-	-	1	-	-	1	2
22	Asessor Sdm Aparatur	-	-	6	-	-	-	-	6
23	Penata Laksana Barang	-	-	-	-	1	12	16	29
24	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa	-	2	39	2	-	-	-	43
25	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	-	1	6	-	-	-	-	7
26	Pranata Keuangan Apbn	-	-	-	-	14	40	63	117
27	Analis Hukum	-	1	1	-	-	-	-	2
	Jumlah	9	466	3.971	3.114	434	997	488	9.479

Lampiran 5.

Pernyataan Telah Direviu

BADAN PUSAT STATISTIK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pusat Statistik. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023
Inspektur Utama,

Akhmad Jaelani

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Jakarta 10010, Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : bpshq@bps.go.id

Lampiran 6.

Daftar Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
1	Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Selatan
2	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau
3	Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan
4	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan
5	Profil Kesehatan Indonesia
6	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
7	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
8	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali
9	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara
10	Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Bengkulu
11	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh
12	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu
13	Statistik Perumahan dan Permukiman
14	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DI Yogyakarta
15	Statistik Potensi Wilayah Provinsi DKI Jakarta
16	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Selatan
17	Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia
18	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau
19	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara
20	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
21	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat
22	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat
23	Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
24	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
25	Statistik Potensi Desa Indonesia
26	Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	Indeks Kebahagiaan
28	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah
29	Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
30	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia
31	Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat
32	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat
33	Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
34	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Gorontalo
35	Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah
36	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Hasil Susenas
37	Statistik Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah
38	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta
39	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
40	Statistik ketenagakerjaan provinsi jawa timur
41	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
42	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh
43	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah
44	Statistik Ketenagakerjaan
45	Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Barat
46	Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota
47	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Provinsi Bengkulu
48	Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali
49	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah
50	Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas
51	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
52	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan
53	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara
54	Booklet Survei Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan
55	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan
56	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau
57	Perempuan dan Laki-Laki Provinsi Jawa Timur
58	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat
59	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan
60	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur
61	Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat
62	Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
63	Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat
64	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur
65	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Lampung
66	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Maluku
67	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara
68	Kompilasi Statistik Upah
69	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
70	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara
71	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
72	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat
73	Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Selatan
74	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
75	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat
76	Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Hasil Susenas 1997
77	Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi DI Yogyakarta
78	Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh
79	Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat
80	Statistik Pendidikan
81	Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur
82	Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi
83	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat
84	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur
85	Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
86	Indikator Sosial Budaya dan Pendidikan Provinsi Jawa Timur
87	Statistik Pemuda Indonesia
88	Statistik Potensi Desa Provinsi DKI Jakarta
89	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Jambi
90	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah
91	Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Hasil Sakernas
92	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu
93	Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
94	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
95	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur
96	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat
97	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh
98	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat
99	Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR
100	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur
101	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua
102	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara
103	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara
104	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung
105	Keadaan Pekerja di Indonesia
106	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten
107	Indikator Pendidikan Provinsi Papua
108	Statistik Penduduk Lanjut Usia
109	Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta
110	Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
111	Indeks Perilaku Anti Korupsi
112	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
113	Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan
114	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia
115	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara
116	Statistik Kesehatan Provinsi Jawa Timur
117	Indeks Pembangunan Desa
118	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara
119	Potensi Desa Provinsi Jawa Barat
120	Profil Industri Mikro dan Kecil
121	Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Utara
122	Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Provinsi Riau
123	Statistik Industri Mikro Kecil Provinsi Aceh
124	Luas Panen dan Produksi Padi Di Provinsi Lampung
125	Produksi Hortikultura Sayuran dan Buah Semusim Provinsi Jawa Barat
126	Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Lampung
127	Produksi Hortikultura Provinsi Jawa Barat

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
128	Statistik Hortikultura Provinsi Jawa Timur
129	Potensi Pertanian DI Yogyakarta
130	Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
131	Produksi Hortikultura Buah dan Sayur Tahunan Provinsi Jawa Barat
132	Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
133	Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur
134	Statistik Wisatawan Nusantara
135	Statistik Telekomunikasi Indonesia
136	Statistik E-Commerce
137	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
138	Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
139	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha
140	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Pengeluaran
141	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
142	Analisis Statistik Sosial (Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi)
143	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Pengeluaran
144	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha
145	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi
146	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha
147	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha
148	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha
149	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran
150	Pengembangan Model Sosial dan Ekonomi: Penggunaan Metode GWR untuk Analisis Data Sosial dan Ekonomi
151	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha
152	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran
153	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha
154	Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Gorontalo
155	Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu menurut Pengeluaran

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
156	Analisis Rumah Tangga Usaha Perkebunan di Indonesia Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Perkebunan
157	Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Selatan
158	Analisis Hasil Listing SE2016 Potensi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
159	Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Sumatera Selatan
160	Indikator Ekonomi
161	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran
162	Indikator Kesejahteraan Rakyat
163	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota (Buku 2: Pulau Jawa dan Bali)
164	Analisis Isu Terkini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
165	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha
166	Studi Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Rumah Tangga Provinsi Banten
167	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia
168	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha
169	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
170	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran
171	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Menurut Pengeluaran
172	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha
173	Indeks Pembangunan Manusia
174	Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Barat
175	Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara
176	Analisis Isu Terkini Ekonomi Makro dan Sosial Provinsi Aceh
177	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DI Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha
178	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
179	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
180	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
181	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
182	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan
183	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha
184	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha
185	Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
186	Analisis Rumah Tangga Usaha Hortikultura di Indonesia Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Hortikultura

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
187	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha
188	Indeks Pembangunan Gender
189	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota
190	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha
191	Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19
192	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
193	Provinsi Riau Dalam Angka
194	Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka
195	Provinsi Bali Dalam Angka
196	Provinsi Lampung Dalam Angka
197	Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka
198	Provinsi Jambi Dalam Angka
199	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali
200	Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka
201	Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka
202	Provinsi Jambi Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
203	Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka
204	Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka
205	Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka
206	Provinsi Maluku Utara Dalam Angka
207	Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka
208	Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka
209	Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka
210	Provinsi Bengkulu Dalam Angka
211	Provinsi Aceh Dalam Angka
212	Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka
213	Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka
214	Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
215	Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka
216	Statistik Indonesia
217	Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
218	Provinsi Jawa Barat Dalam Angka
219	Provinsi Papua Dalam Angka
220	Provinsi Papua Barat Dalam Angka
221	Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka
222	Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka
223	Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
224	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka
225	Provinsi Gorontalo Dalam Angka
226	Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka
227	Provinsi Papua Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
228	Provinsi Jawa Timur Dalam Angka
229	Provinsi Banten Dalam Angka
230	Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka
231	Provinsi Maluku Dalam Angka
232	Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka
233	Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2021
234	Peta Tematik Kemiskinan Provinsi Lampung
235	Statistik Indonesia Dalam Infografis
236	Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
237	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat
238	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi
239	Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
240	Kota Ternate Dalam Angka
241	Analisis Indikator Logistik Pangan (Beras) Provinsi Jawa Barat
242	Provinsi Banten Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Lampiran 7.

Daftar K/L/D/I yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2022

No	K/L Penyelenggara Kegiatan	Unit Kerja	Judul Kegiatan	No. Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Pusat Laboratorium Narkotika BNN	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat Laboratorium Narkotika BNN	V-22.0000.001
		Badan Riset dan Inovasi Nasional	Survei Riset Sektor Industri/Badan Usaha Tahun 2022	V-22.0000.005
		Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan Rehabilitasi BNN	V-22.0000.013
		Badan Narkotika Nasional	Survei Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi	V-22.0000.015
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum Inspektorat Utama	Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	V-22.0000.002
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Inspektorat Utama	Survei Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	V-22.0000.019
3	Kementerian Hukum dan HAM	BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM	Survei Implementasi Nilai BerAKHLAK	V-21.0000.017
			Survei Kepuasan Masyarakat Komnas HAM Tahun 2022	V-22.0000.018
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi - Badan Riset dan Inovasi Nasional	Survei Inovasi Sektor Bisnis Tahun 2021	V-22.0000.003
		Badan Riset dan Inovasi Nasional	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022	V-22.0000.009
5	Komisi Informasi Pusat RI	Komisi Informasi Pusat RI	Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik	V-22.0000.004
6	Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedeputian Pencegahan dan	Survei Penilaian Integritas	V-22.0000.007

No	K/L Penyelenggara Kegiatan	Unit Kerja	Judul Kegiatan	No. Rekomendasi
		Monitoring, Direktorat Monitoring,		
7	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kementerian Koperasi dan UMKM	Pendataan Lengkap KUMKM 2022 (240 Kab/Kota)	V-22.0000.006
8	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Survei Cadangan Beras Nasional	V-22.0000.008
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Survei Hasil Pembangunan Zona Integritas (SHPZI) Tahun 2022	V-22.0000.012
10	Kementerian Agama Republik Indonesia	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia	Survei Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2022	V-22.0000.011
11	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Survei Kepuasan Layanan Pengawasan	V-22.0000.010
		Puslitbangdiklat LPP RRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Survei Pendengan di 5 Kota/Kabupaten Wilayah 3T (Terpencil, Terluar, Terdepan) Tahun 2022	V-22.0000.014
12	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tahun 2022	V-22.0000.016
13	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Layanan Informasi & Pengaduan Konsumen Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022	V-22.0000.017

Lampiran 8.

Dokumentasi Pembinaan K/L/D/I Tahun 2022

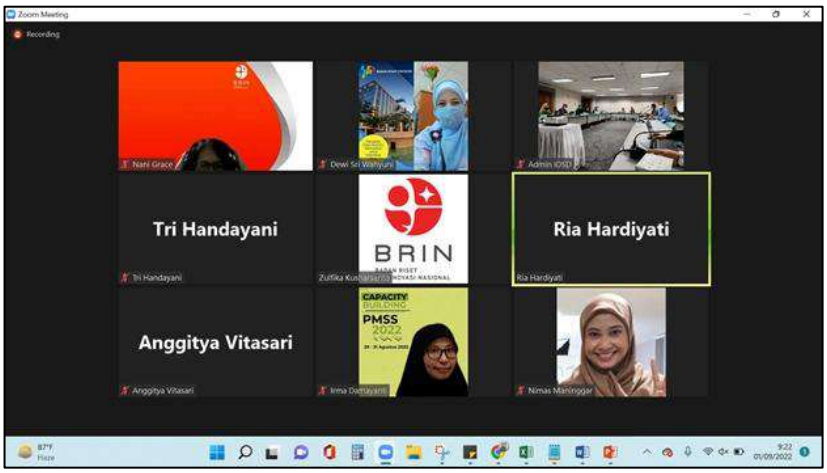

Badan Riset dan Inovasi Nasional

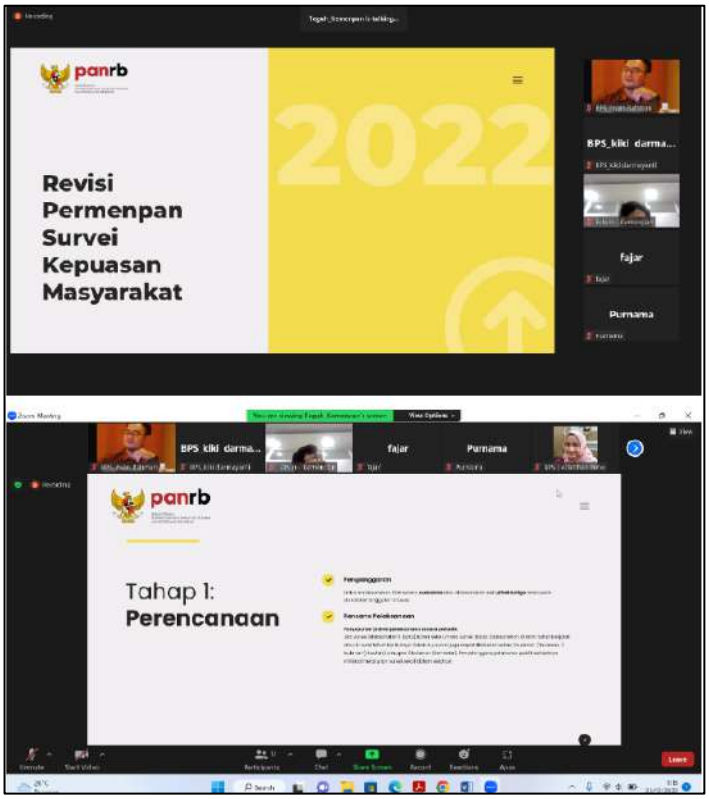

Kementerian PAN dan RB

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

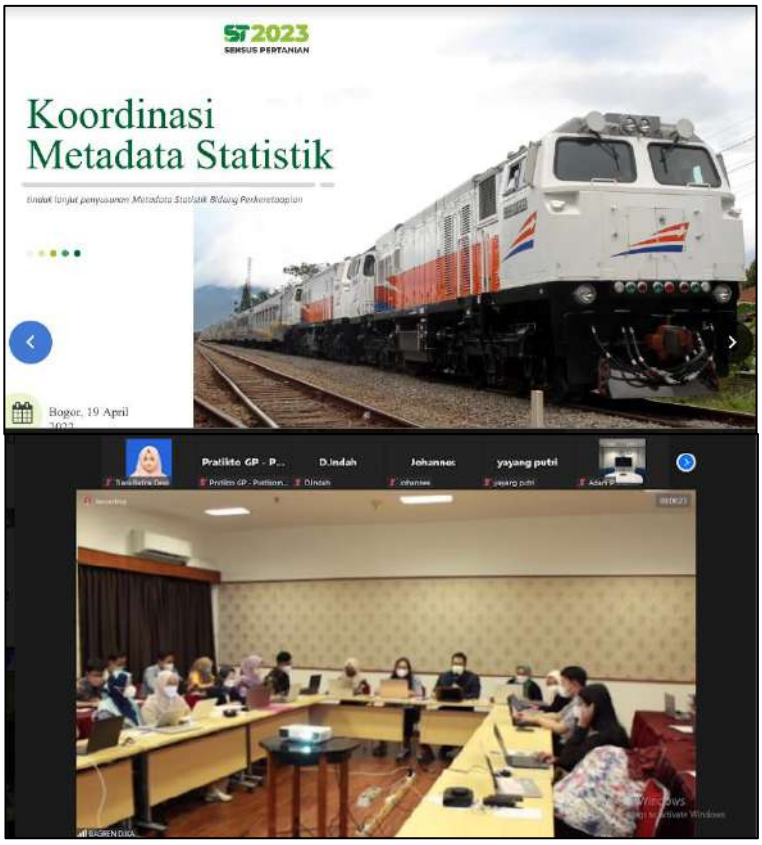

Kementerian Perhubungan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

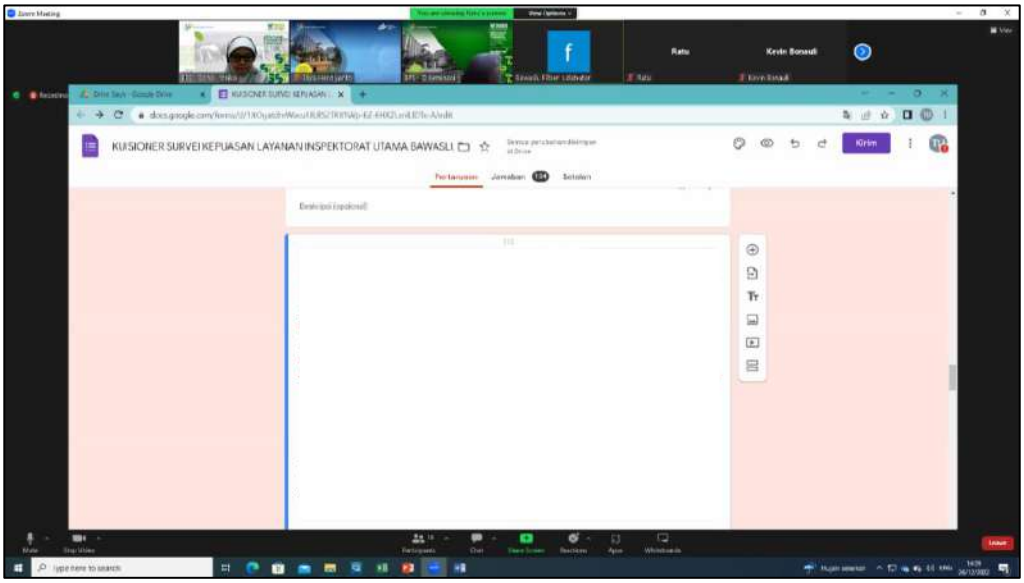

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Lampiran 9.

Daftar K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar Tahun 2022

No.	K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar
(1)	(2)
1	Kementerian Agama
2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3	Kementerian Keuangan
4	Kementerian Kesehatan
5	Kementerian Ketenagakerjaan
6	Kementerian Perhubungan
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika
8	Kementerian Pertanian
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
11	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
14	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
15	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
16	Badan Informasi Geospasial
17	Badan Narkotika Nasional
18	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
19	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
20	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21	Badan Pengawas Pemilihan Umum
22	Badan Riset dan Inovasi Nasional
23	Komisi Informasi Pusat RI
24	Komisi Pemberantasan Korupsi
25	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
26	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
28	Ombudsman Republik Indonesia

Lampiran 10.

Daftar K/L/D/I yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral Secara Mandiri

No.	K/L/D/I yang yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral Secara Mandiri
(1)	(2)
1	Kementerian Dalam Negeri
2	Kementerian Agama
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	Kementerian Keuangan
5	Kementerian Kesehatan
6	Kementerian Sosial
7	Kementerian Ketenagakerjaan
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Kementerian Perhubungan
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika
11	Kementerian Pertanian
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
17	Badan Kepegawaian Negara
18	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/BRIN

Lampiran 11.

Daftar Prestasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2022

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari			
1	BPS KOTA BUKITTINGGI	Penghargaa atas pelayanan prima pembinaan statistik sektoral dalam rangka survei penyusunan harga pemerintah kota bukittinggi	Badan Keuangan Kota Bukittinggi
2	BPS KOTA SALATIGA	Pembina Data pada Forum Satu Data untuk Penguatan Penyelenggaraan SDI dan Produsen Data dalam Publikasi Statistik Sektoral (Dataku) 2021	Diskominfo Kota Salatiga
3	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi dalam penetapan Usulan Upah Minimum Kota Salatiga Tahun 2022	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga
4	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan data kependudukan dan gender yang dibutuhkan DP3APPKB Kota Salatiga	Dinas P3AKB Kota Salatiga
5	BPS KABUPATEN SITUBONDO	The Best Partner in Public Policy Consulting	Bappeda Kabupaten Situbondo
6	BPS KABUPATEN SITUBONDO	The Best Partner in Statistical Consulting	Diskominfo Kabupaten Situbondo
7	BPS PROVINSI BANTEN	Kepatuhan Pelaporan Pajak SPT Masa Terbaik Pertama	DJP KPP Pratama
8	BPS KABUPATEN SERANG	Instansi Terpercaya Penyedia Indikator Strategis Pembangunan Kab. Serang	Bappeda Kabupaten Serang
9	BPS KABUPATEN SERANG	Penghargaan sebagai Pembina Data atas Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Serang 2021	Diskominfosatik Kabupaten Serang
10	BPS PROVINSI BALI	Kementerian/Lembaga Berkinerja Tebaik Pertama Dalam Pelaksanaan Anggaran Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	Kanwil DJPb Provinsi Bali
11	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW Semester I Tahun 2021 Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat	DJPb Provinsi NTB

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
12	BPS KABUPATEN SUKAMARA	Satuan Kerja Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sangat Baik Periode Desember 2021	KPPN Pangkalan Bun
13	BPS KABUPATEN LAMANDAU	Satuan Kerja Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sangat Baik Periode Desember 2021	KPPN Pangkalan Bun
14	BPS KABUPATEN GUNUNG MAS	Pelaporan SPT Tepat Waktu dan Paling Awal Tahun 2022	KP2KP Kuala Kurun
15	BPS KABUPATEN BARITO TIMUR	Satuan Kerja Dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik Ketiga Semester II Tahun 2021	KPPN Tipe A Buntok
16	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	Satker dengan Partisipasi Aktif mendukung Program Cashless melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2021	KPPN Palu
17	BPS KABUPATEN KONAWE UTARA	Penghargaan atas Kerjasana dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam Publikasi Data Tahunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021	Bupati Konawe Utara
18	BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA	Pencapaian Nilai IKPA Tertinggi Kategori Pagu Kecil TA. 2021	KPPN Mamuju
19	BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2021	KPPN Mamuju
Februari			
20	BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT	Peringkat Ke III Kategori Penyusunan LPJ Bendahara Dan Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Lingkup KPPNSidikalang Periode Semester II Tahun 2021	KPPN Sidikalang
21	BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT	Peringkat Ketiga Kategori Penilaian Realisasi dan kinerja anggaran dengan pagu kecil (dibawah 4,5 Milyar) lingkup KPPN Sodikalang Periode Semester II Tahun 2021	KPPN Sidikalang
22	BPS KABUPATEN SOLOK	Kepatuhan dalam penyampaian laporan saldo rekening satuan kerja tahun anggaran 2021	KPPN
23	BPS KABUPATEN SIJUNJUNG	Nilai Kinerja Akurasi Pelaksanaa Anggara Terbaik Semester II 2021	KPPN
24	BPS KOTA SAWAH LUNTO	Nilai Kinerja Kepatuhan Terhadap Regulasi Terbaik Semester II 2021	KPPN Sijunjung

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
25	BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Penghargaan Eksternal_IKPA Tahun 2021_21 Feb 2022	KPPN Rengat
26	BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Instansi/Lembaga yang sangat responsif dan proaktif dalam memberikan data guna perencanaan dan Evaluasi Kegiatan PN Gunung Sugih	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
27	BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Peringkat Pertama Satker Dengan Nilai IKPA Tertinggi Tahun 2021 Lingkup KPPN Pangkalpinang	KPPN Pangkalpinang
28	BPS KABUPATEN BANGKA SELATAN	Peringkat Kedua Satker Dengan Nilai IKPA 99.25 Kategori Pagu DIPA Di Atas 2.5 Milliar sd 10 Milliar Tahun 2021	KPPN Pangkalpinang
29	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi pada penyusunan LKPJ Walikota 2021, E DATABASE Jateng 2021 dan RPD 2023-2026	Bappeda Kota Salatiga
30	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi dalam pemenuhan data kependudukan yang dibutuhkan PDAM Kota Salatiga	PDAM Kota Salatiga
31	BPS KABUPATEN JEMBRANA	Satker Best Performance Semester II Tahun 2021	KPPN Singaraja
32	BPS KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat Periode Januari 2022	KPPN Selong
33	BPS KOTA MATARAM	Penghargaan Pembinaan Statistik Sektoral	Kominfo Kota Mataram
34	BPS KABUPATEN BARITO SELATAN	Satker Capaian Kinerja Terbaik V Semester 2 Tahun 2021 dari KPPN Buntok	KPPN Buntok
35	BPS KABUPATEN MURUNG RAYA	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ketiga Semester II 2021	KPPN Buntok
36	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Peringkat Ketiga Satuan Berkinerja Terbaik dalam IKPA TA.2021 Kategori Pagu di atas 4 Miliar Rupiah	KPPN Tanjung
37	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Peringkat Pertama Satuan Berkinerja Terbaik dalam Penggunaan DIGIPAY 2021	KPPN Tanjung
38	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	Satuan Kerja dengan Nilai Capian Output Terbaik Tahun 2021	KPPN Palu
39	BPS KABUPATEN DONGGALA	Nilai Capaian Output terbaik tahun anggaran 2021 satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Palu	KPPN Palu

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
40	BPS KABUPATEN DONGGALA	Terbaik 3 Nilai IKPA tahun 2021 satuan kerja lingkup wilayah KPPN Palu	KPPN Palu
41	BPS KOTA PALU	Terbaik Ketiga Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Cepat Periode Februari 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
42	BPS KABUPATEN BUTON	Peringkat 3 Satuan Kerja Terbaik Kategori Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara	KPPN Buton
43	BPS KABUPATEN KOLAKA	Juara Harapan 2 Lomba Kebersihan Lingkungan Kategori Kantor Instansi Vertikal (28 Februari 2022)	Bupati Kolaka
44	BPS KABUPATEN BOALEMO	Satker IKPA Tertinggi Pertama Tahun 2021	KPPN Marisa
45	BPS KABUPATEN BOALEMO	Pengelolaan Rekening Terbaik	KPPN Marisa
46	BPS KABUPATEN GORONTALO	Peringkat Ketiga Satuan Kerja Tercepat dalam Pengajuan gaji Januari 2022 melalui SAKTI se-Provinsi Gorontalo dari KPPN Gorontalo	KPPN Gorontalo
47	BPS KABUPATEN POHUWATO	Satuan Kerja dengan Pengelolaan Rekening Terbaik Kedua Tahun Anggaran 2021	KPPN Marisa
48	BPS KABUPATEN RAJA AMPAT	Piagam Penghargaan Pelaporan Keuangan Terbaik Kedua	KPPN Sorong
49	BPS KOTA SORONG	Peringkat Pertama Satker dengan Pelaporan Keuangan Terbaik Pagu 5-20 M Bulan Februari Tahun 2022	KPPN Sorong
50	BPS KOTA SORONG	Satker yang Mengimplementasikan Digital Marketplace Terbaik Kedua di Bulan Februari Tahun 2022	KPPN Sorong
51	POLSTAT STIS	Best Answer Pada Riddle I The Unsolved Mysteri MCF ITB	Institute Teknologi Bandung
Maret			
52	BPS KABUPATEN ACEH TENGGARA	Peringkat Kedua penilaian IKPA lingkup KPPN Kutacane	KPPN Kutacane
53	BPS KABUPATEN BENER MERIAH	Satker Peringkat Pertama dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021	KPPN Takengon
54	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	Nilai IKPA terbaik 3 periode tahun anggaran 2021 kategori Pagu Kecil (< Rp 4.000.000.000,00-)	KPPN Rantauprapat

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
55	BPS KABUPATEN PASAMAN	Terbaik Kedua Penilaian Kinerja Anggaran TA2021	KPPN Lubuk Sikaping
56	BPS KABUPATEN PASAMAN	Terbaik Pertama Penilaian LPJ Bendahara Pengeluaran TA2021	KPPN Lubuk Sikaping
57	BPS KOTA BUKITTINGGI	Penghargaan atas pelayanan prima dalam rangka mewujudkan pojok statistik IAIN Syech Djamil Djambek	IAIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi
58	BPS PROVINSI JAMBI	Juara 3 Kanwil DJKN SJB Award pada Kelompok 1 (Korwil yang Memiliki Satker di Bawahnya) untuk Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Wilayah Jambi	Kanwil DJKN SJB
59	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Dukungan Dalam Peningkatan Data Statistik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur	Disdikbud Kab. Oku Timur
60	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Juara Umum Penganugrahan Satker Award T.A 2021	KPPN Manna
61	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 1 Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran T.A 2021	KPPN Manna
62	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 1 Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian Rekening Koran T.A 2021	KPPN Manna
63	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA T.A 2021	KPPN Manna
64	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 1 Nilai IKPA Tertinggi T.A 2021	KPPN Manna
65	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 1 Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Tertinggi T.A 2021	KPPN Manna
66	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat 3 Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan T.A 2021	KPPN Manna
67	BPS KABUPATEN MUKOMUKO	IKPA Satker Terbaik Ketiga Tahun 2021	KPPN Mukomuko
68	BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Instansi/Lembaga yang memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan data statistik dasar guna menunjang program kegiatan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B	Pengadilan Agama Gunung Sugih
69	BPS KABUPATEN MESUJI	Instansi yang memberikan data terlengkap dalam kegiatan Musrenbang Kabupaten Mesuji Tahun 2022	Bappelitbangda Mesuji

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
70	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Satuan Kerja Terbaik tanpa Adanya Retur SP2D	Kanwil DJPb NTB
71	BPS KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat Periode Februari 2022	KPPN Selong
72	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021	KPP Pratama Waingapu
73	BPS KOTA SINGKAWANG	Terbaik I Penyusun LK tingkat UAKPA	KPPN Singkawang
74	BPS KOTA SINGKAWANG	Satker Berkinerja terbaik Implementasi IKPA	DJPb Kanwil Kalimantan Barat
75	BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	Penghargaan Penyediaan Data Statistik Berkualitas untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
76	BPS KABUPATEN PULANG PISAU	Penghargaan sebagai Narasumber dan Dukungan Sumber Data Perencanaan dan Monitoring/Evaluasi Kabupaten Pulang Pisau	Bappedalitbang Kab. Pulang Pisau
77	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Program Pembinaan Statistik Sektoral Tematik Koperasi dan UMKM	Dinas PPKUKM Provinsi Kalimantan Utara
78	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Peringkat 1 Capaian Output Tertinggi Tahun 2021	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
79	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Sharing Knowledege Program Pembinaan Statistik Sektoral di Dinas DPMPTSP	DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
80	BPS KABUPATEN KOLAKA	Peringkat 1 Nilai IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2021 (31 Maret 2022)	DJPB Prov. Sulawesi Tennggara
81	BPS KABUPATEN KOLAKA UTARA	Peringkat Kedua Nilai IKPA Tahun Anggaran 2021	Kanwil DJPB Prov. Sultra
82	BPS KABUPATEN KOLAKA UTARA	Nilai IKPA Tertinggi Kedua Kategori Pagu Kecil Tahun Anggaran 2021	Kanwil DjPb Provinsi Sulawesi Tenggara
83	BPS KABUPATEN KONAWE UTARA	Apresiasi sebagai pemateri "Strategi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Konawe Utara" dalam acara Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023	Bupati Konawe Utara
84	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	Satker dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Tertinggi Kedua Tahun Anggaran 2021	KPPN Manokwari

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
85	POLSTAT STIS	Juara 1 Infographics Challenge 2022 pada Data Analytics for Sustainable Developement in Society 5.0	Universitas Islam Bandung
86	POLSTAT STIS	Juara 2 Kategori Mahasiswa pada COMATH 4.0 (Competition of Mathematics Uhamka 4.0) 2022	UHAMKA
April			
87	BPS KOTA SUBULUSSALAM	Peringkat 1 IKPA satker pagu sedang Triwulan 1 2022	KPPN Tapaktuan
88	BPS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	Terbaik Ketiga Indikator Pelaksanaan Anggaran Tw I Tahun 2022 Kategori Pagu Sedang	KPPN Padangsidimpuan
89	BPS KABUPATEN AGAM	Pembina Dalam Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Agam Tahun 2022	Diskopindag Kabupaten Agam
90	BPS PROVINSI RIAU	Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Terbaik (Kategori Sedang) Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Riau Tahun 2021	Kanwil DJPb Provinsi Riau
91	BPS KABUPATEN KERINCI	Juara 3 Satuan Kerja Terbaik Triwulan I Tahun 2022 Kategori Pagu Anggaran Besar	KPPN Tipe A2 Sungai Penuh
92	BPS KOTA BENGKULU	Tim Penyusun Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu 2022	Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bengkulu
93	BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Konstribusi Aktif Dalam Menyediakan Data Strategis Guna Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah	Bappeda Kab. Lampung Tengah
94	BPS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	Apresiasi atas Hasil Evaluasi IKPA Satker Mitra Kerja KPPN TW 1 TA 2022	KPPN Kotabumi
95	BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Peringkat Pertama Satker Dengan Nilai IKPA Tertinggi Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Bangka Belitung	Kanwil DJPB Bangka Belitung
96	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Salatiga 2021	Sekretariat Daerah Kota Salatiga

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
97	BPS KABUPATEN SERANG	Instansi Penyedia Data Ketenagakerjaan Paling Informatif Tahun 2021	Disnakertrans Kabupaten Serang
98	BPS KABUPATEN SERANG	Satuan Kerja dengan Kinerja Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) Terbaik Ketiga Tahun 2021	KPPN Serang
99	BPS KABUPATEN GIANYAR	Apresiasi atas penyelesaian lebih awal migrasi data persediaan Aplikasi Sakti Tahun 2022 di lingkungan Kanwil DJPB Bali	Kanwil DJPB Provinsi Bali
100	BPS KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat Periode Maret 2022	KPPN Selong
101	BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	Gerakan Zero Retur	KPPN Pangkalan Bun
102	BPS KABUPATEN MURUNG RAYA	Pencapaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 Melalui E-Filing	KPP Pratama Muara Teweh
103	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Capaian IKPA Tertinggi Kategori Pagu Kecil Periode Triwulan I Tahun 2022	KPPN Benteng
104	BPS KABUPATEN BONE BOLANGO	Pembina Statistik Sektoral Dalam Kegiatan Desa Cinta Statistik	Pemerintah Desa Talulobutu
105	BPS KABUPATEN KAIMANA	Penghargaan Pelopor Digital Payment – Marketplace Pemerintah	KPPN FAK-FAK
106	POLSTAT STIS	Juara 2 Olipiade nasional Statistika Statistics Fest UGM 2022	UGM
107	PUSDIKLAT BPS	Lembaga Penyelenggaran Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 2 (dua) dengan nilai 92,312 (nilai tertinggi yang pernah dicapai Lembaga Pelatihan di Indonesia)	LAN Republik Indonesia
108	PUSDIKLAT BPS	Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori Akreditasi A	LAN Republik Indonesia
Mei			
109	BPS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Terbaik I. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2022	KPPN Tapaktuan
110	BPS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Terbaik III. Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	KPPN Tapaktuan
111	BPS KABUPATEN SIJUNJUNG	Melakukan pembinaan Statistik Sektoral	Diskominfo Kab. Sijunjung

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
112	BPS KABUPATEN SIJUNJUNG	Mewujudkan Satu Data indonesia	BAPPPEDA Kab. Sijunjung
113	BPS KOTA SAWAH LUNTO	Partisipasi mendukung program BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok
114	BPS KOTA DUMAI	Penghargaan IKPA Triwulan I 2022	KPPN Dumai
115	BPS PROVINSI JAMBI	Partisipasi Kepala BPS Prov. Jambi dalam Rakor dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar III se-Provinsi Jambi	Sekda Provinsi Jambi
116	BPS KABUPATEN OGAN ILIR	Mitra Kerja	Bappeda Kabupaten Ogan Ilir
117	BPS KABUPATEN LEBONG	Satker dengan Nilai IKPA Maksimal (100) pada Triwulan I 2022	KPPN Curup
118	BPS KOTA BENGKULU	Penyedia Data Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2021	Dinas KP2 Kota Bengkulu
119	BPS KOTA PEKALONGAN	Penghargaan Kegiatan Desa Cantik	Dinkominfo Kota Pekalongan
120	BPS KOTA PEKALONGAN	Penghargaan Kegiatan Satu Data Indonesia (SDI)	Dinkominfo Kota Pekalongan
121	BPS PROVINSI SULAWESI UTARA	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I Tahun 2022.	DJPB Provinsi Sulawesi Utara
122	BPS KABUPATEN MINAHASA	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I Tahun 2022.	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
123	BPS KABUPATEN MINAHASA SELATAN	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I Tahun 2022.	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
124	BPS KOTA MANADO	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I Tahun 2022.	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
125	BPS KOTA TOMOHON	Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik di Provinsi Sulawesi Utara Periode Triwulan I Tahun 2022.	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
126	BPS KABUPATEN BUTON	Peringkat 3 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Sedang	DJPB
127	BPS KABUPATEN MUNA	Peringkat Keempat Satker Lingkup KPPN Raha Dalampenilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	KPPN RAHA
128	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	Terbaik 1IKPA Triwulan 1 Kategori Pagu Sedang	KPPN BAUBAU

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
129	BPS KABUPATEN BONE BOLANGO	Kerjasama Dalam Pelaksanaan Survei Statistik Tanaman Pangan (Ubinan Subround I) Tahun 2022	Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango
130	BPS PROVINSI MALUKU	Peringkat I UAPPA-W Kategori Sedang Dalam Penyusunan LK K/L Tingkat Wilayah Tahun 2021 Unaudited Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku	Kanwil DJPb Provinsi Maluku
131	POLSTAT STIS	Juara 1 Esai KSATRIA 2022	Universitas negeri Yogyakarta
132	POLSTAT STIS	Juara 1 Lomba Nasional Info grafis Hukum 2022	UNISKA MAB
133	PUSDIKLAT BPS	Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Terakreditasi A	LKPP
Juni			
134	BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA	IKPA Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige Kepada Kabupaten Tapanuli Utara Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022	KPPN Balige
135	BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR	Terbaik III - Kualitas Laporan Keuangan Mitra KPPN Balige TA 2021	KPPN Balige
136	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Dukungan Dalam Menyukseskan Pencanangan Padang Panjang Menuju Kota Statistik dan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik)	Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
137	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Nilai IKPA Sempurna Trwiulan I Tahun 2022	KPPN Baturaja
138	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Penghargaan Sebagai Mitra Kerja Kooperatif Penyedia Data Dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir
139	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Satker Lingkup KPPN Baturaja Dengan Predikat Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna	KPPN
140	BPS KABUPATEN OGAN ILIR	Mitra Kerja	Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir
141	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	Dukungan Penyediaan Data Statistik Dalam Aplikasi Sik3 Polres Pringsewu Dan Polsek (Jajarannya)	Polres Pringsewu
142	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	Peringkat I IKPA Triwulan I Tahun 2022 Kategori Pagu > 10 s.d. 50 Miliar Rupiah	KPPN Surabaya I

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
143	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	Pembina Satu Data Jawa Timur 2022	Gubernur Jawa Timur
144	BPS KOTA DENPASAR	Penyelesaian Lebih Awal Migrasi Data Persediaan Aplikasi Sakti Tahun 2022 Lingkup DJPB Provinsi Bali	Kanwil DJPB Provinsi Bali
145	BPS KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tercepat Periode Mei 2022	KPPN Selong
146	BPS KABUPATEN SUKAMARA	Satuan Kerja dengan Penggunaan CMS Tertinggi Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Pangkalan Bun
147	BPS KOTA PALU	Terbaik Pertama Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Cepat Periode Juni 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
148	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	IKPA Tahun 2021 yang Melebihi Target Nasional Dengan Nilai 96,39	KPPN Mamuju
149	POLSTAT STIS	Juara 1 Lomba Science Infographics for Student	Universitas Negeri Surabaya
		Juli	
150	BPS KOTA LHOKSEUMAWE	Peringkat I (PERTAMA) Pengguna CMS Terbanyak Kategori Kepatuhan Administrasi Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Lhokseumawe
151	BPS KABUPATEN NIAS	10 Besar Satuan Kerja Capaian IKPA Terbaik Triwulan I	KPPN Gunungsitoli
152	BPS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	Terbaik Empat IKPA Semester I Tahun 2022	KPPN Padangsidimpuan
153	BPS KABUPATEN AGAM	Peran Aktif Mitra Satker Penyedia Data Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023	Bappeda Kabupaten Agam
154	BPS KABUPATEN PASAMAN	Implementasi Transaksi Non Tunai Menggunakan CMS Periode Sampai Dengan Juni 2022	KPPN Lubuk Sikaping
155	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan SDI	Bupati Pasaman Barat
156	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan ImplementasiTransaksi Non Tunai menggunakan CMS pada rekening Virtual Pengeluaran	KPPN Lubuk Sikaping
157	BPS KABUPATEN KERINCI	Juara 3 Satuan Kerja Terbaik Triwulan III 2022 Kategori Pagu Anggaran Besar	Kppn Tipe A2 Sungai Penuh
158	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Terbaik II Nilai IKPA Trwiulan II Tahun 2022	KPPN Baturaja

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
159	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Peningkatan Statistik Sektoral di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim
160	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Juara 1 (Tim Campur Sari) "Pembinaan Public Speaking" Tahun 2022	Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
161	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Peringkat Ke-I Sakter Dengan Tingkat Kedisiplinan Penyampaian LPJ Terbaik Dan Partisipasi Dalam Penyelesaian Migrasi Saldo Awal Sakti 2022	KPPN
162	BPS KOTA BENGKULU	Penyedia Data Statistik Dalam Rangka Usulan Kenaikan Tipe Polres Bengkulu	Kepolisian Resor Bengkulu
163	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	Apresiasi atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyediaan data untuk perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pringsewu	Disdikbud Kabupaten Pringsewu
164	BPS KABUPATEN BANGKA BARAT	BAM Saldo Awal Modul GLP SAKTI Tahun Anggaran 2022 secara Cepat dan Benar	KPPN Pangkalpinang
165	BPS KABUPATEN BANGKA BARAT	BAM Saldo Awal Modul Persediaan SAKTI Tahun Anggaran 2022 Secara Cepat dan Benar	KPPN Pangkalpinang
166	BPS KABUPATEN BANGKA SELATAN	BAM Saldo Awal Modul Aset Tetap Sakti TA 2022 Secara Cepat dan Benar	KPPN Pangkalpinang
167	BPS KABUPATEN BANGKA SELATAN	BAM Saldo Awal Modul Persediaan Sakti TA 2022 Secara Cepat dan Benar	KPPN Pangkalpinang
168	BPS KOTA PANGKAL PINANG	Penghargaan (BAM) Saldo Awal Modul Aset Tetap SAKTI	KPPN Pangkalpinang
169	BPS KOTA PANGKAL PINANG	Penghargaan (BAM) Saldo Awal Modul GLP SAKTI	KPPN Pangkalpinang
170	BPS KOTA PANGKAL PINANG	Penghargaan (BAM) Saldo Awal Modul Persediaan SAKTI	KPPN Pangkalpinang
171	BPS KABUPATEN SUBANG	Peringkat 2 Penilaian Kualitas Pelaporan Capaian Output TW 2	KPPN Purwakarta
172	BPS KABUPATEN PURWAKARTA	Peringkat Kedua Penilaian IKPA Triwulan II Tahun 2022 Kategori Pagu Lebih dari 5 Miliar s.d. 10 Miliar	KPPN Purwakarta
173	BPS KABUPATEN BANJARNEGARA	Penggunaan UP Bendahara Pengeluaran melalui Digipay marketplace di lingkungan Wilayah	KPPN Banjarnegara

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kerja KPPN Banjarnegara Periode Semester I Tahun 2022	
174	BPS KABUPATEN KULON PROGO	Penghargaan LPJ Bendahara Pengeluaran Sem I 2022	KPPN Wates
175	BPS KABUPATEN TUBAN	Penyelesaian Tercepat Migrasi Saldo Awal Modul Pelaporan	KPPN Tuban
176	BPS KABUPATEN TUBAN	Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 oleh Seluruh ASN BPS Kabupaten Tuban sebesar 100%	KPP Pratama Tuban
177	BPS PROVINSI BALI	Penyelesaian Lebih Awal Migrasi Data Persediaan Aplikasi SAKTI Tahun 2022 Tingkat Wilayah Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali	Kanwil DJPb Provinsi Bali
178	BPS KABUPATEN BADUNG	Penyelesaian Lebih Awal Migrasi Data Persediaan Aplikasi SAKTI Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bali	Kanwil DJPb Provinsi Bali
179	BPS KABUPATEN BELU	Terbaik Kedua Nilai Indikator Kinerja Pelaksaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2022, Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Belanja 5 s.d. 10 Miliar Rupiah	KPPN Atambua
180	BPS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	Terbaik Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I 2022 tingkat satker lingkup KPPN Sampit (kategori : Pagu 3-10 Milyar)	KPPN Sampit
181	BPS KABUPATEN KATINGAN	Sertifikat Penghargaan Satker Terbaik II IKPA Semester I 2022	KPPN Sampit
182	BPS KABUPATEN TAPIN	Peringkat Pertama Implementasi Market Place dan Digital payment pada kategore berdasarkan jumlah nominal transaksi semester I TA 2022	KPPN Barabai
183	BPS KABUPATEN TAPIN	Satker Terbaik Kedua Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada kategore Frequensi Transaksi semester I TA 2022	KKPN Barabai
184	BPS KABUPATEN TAPIN	Satker Terbaik Kedua Imlementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Kategore Jumlah Nominal Transaksi Semester I TA 2022	KPPN Barabai
185	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Satuan Kerja Terbaik Pertama Implementasi Kartu Kredit	KPPN Barabai

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemerintah pada Kategori Jumlah Nominal Transaksi Semester 1 TA 2022	
186	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Satuan Kerja Terbaik Pertama Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Kategori Frekuensi Transaksi Semester 1 TA 2022	KPPN Barabai
187	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Satker berpredikat Zero Retur Semester 1 2022	KPPN Barabai
188	BPS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Dengan Kategori Ikpa Sangat Baik Di Provinsi Sulawesi Utara Periode Semester 1 Tahun 2022	DJPB Provinsi Sulawesi Utara
189	BPS KABUPATEN MINAHASA UTARA	Satker Lingkup KPPN Bitung Dengan Nilai IKPA Terbaik Ke 1 Kategori Pagu Dibawah 10 Milyar dan Bobot Indikator dibawah 70%	KPPN Bitung
190	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	Satker dengan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2022	KPPN Palu
191	BPS KABUPATEN WAJO	Piagam Pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Kabupaten Wajo	Pemda Kab Wajo
192	BPS KABUPATEN BUTON	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Sedang	DJPB
193	BPS KABUPATEN KOLAKA	Peringkat 1 Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang Semester 1 2022 (28 Juli 2022)	KPPN Kolaka
194	BPS KABUPATEN KOLAKA UTARA	Peringkat III Pengguna Marketplace - Digipay Terbaik Semester 1 Tahun 2022	KPPN Kolaka
195	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	Terbaik 2 Ikpa Triwulan 2 Kategori Pagu Sedang	Kppn Baubau
196	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringkat 2 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik Semester I Tahun 2022	Kppn Kolaka
197	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringkat 3 Nilai IKPA terbaik kategori Pagu Sedang 3 s.d 10 Miliar Semester I Tahun 2022	Kppn Kolaka
198	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringkat III Satuan kerja Non Kemenkeu dengan nominal transaksi melalui digipay terbesar lingkup Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara periode semester I 2022	Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
199	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringakat 2 sebagai Satuan kerja non kemenkeu dengan jumlah transaksi Digipay terbanyak lingkup kanwil DJPB Sulawesi Tenggara periode semester I 2022	Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara
200	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringkat 1 sebagai pengguna marketplace - Digipay terbaik Semester I Tahun 2022	KPPN Kolaka
201	BPS KABUPATEN MAMASA	IKPA Terbaik Semester I	DJPB
202	BPS KABUPATEN NABIRE	Peringkat 3 Nilai Ikpa Kategori Pagu Besar (Lebih Dari 2,4 M)	KPPN Nabire
Agustus			
203	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA	Ketepatan Waktu Penyampaian Lpj Bendahara Penerimaan Bulan Juli 2022 Tercepat	KPPN Medan
204	BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA	Kualitas Laporan Keuangan Mitra Kantor Pelayaanan Perbendaharaan Negara Balige Kepada Kabupaten Tapanuli Utara Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Tapanuli Utara
205	BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA	Satkere Lingkup Kppn Balige Dengan Nilai Ikpa Terbaik-II Kategori Dipa Sedang Periode Triwulan Ii Tahun 2022	KPPN Tapanuli Utara
206	BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR	Piagam Terbaik III - IKPA Terbaik III Lingkup KPPN Balige TW II 2022	KPPN Balige
207	BPS KABUPATEN TOBA SAMOSIR	Piagam Terbaik III - Kualitas Laporan Keuangan Mitra KPPN Balige Semester I TA 2022	KPPN Balige
208	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU	Tercepat Kedua Dalam Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Semester I TA 2022	KPPN rantau prapat
209	BPS KABUPATEN ASAHAN	Peringkat Empat Pengelolaan Kinerja APBN Semester I 2022	KPPN Tanjung Balai
210	BPS KABUPATEN ASAHAN	Peringkat enam kinerja terbaik Penggunaan uang Persediaan Semester I TA.2022	KPPN Tanjung Balai
211	BPS KABUPATEN SIMALUNGUN	Peringkat Pertama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester i Tahun Anggaran 2022 Kategori PAGU DIPA Kelolaan Besar	KPPN Pematang Siantar
212	BPS KABUPATEN SIMALUNGUN	Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan APBN Semester I Tahun	KPPN Pematang Siantar

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Anggaran 2022 Kategori PAGU DIPA Kelolaan Besar	
213	BPS KABUPATEN DAIRI	Peringkat Ketiga KPA Kategori KPA Inspiratif 2022	KPPN Sidikalang
214	BPS KABUPATEN KARO	Kinerja terbaik penggunaan UP dengan implementasi kartu kredit pemerintah lingkup KPPN sidikalang periode Semester I tahun anggaran 2022	KPPN Sidikalang
215	BPS KABUPATEN KARO	KPA inspiratif lingkup kantor pelayanan perbendaharaan negara sidikalang periode semester I tahun anggaran 2022	KPPN Sidikalang
216	BPS KABUPATEN SAMOSIR	Peringkat Pertama, Kualitas Laporan Keuangan Mitra KPPN Balige Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Balige
217	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	Satker Terbaik Kedua dalam Pengelolaan Rekening LIngkup KPPN Rantau Prapat Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Rantauprapat
218	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	Satker Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Uang Persediaan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Rantauprapat
219	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	Peringkat Kedua Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Lingkup KPPN Rantauprapat Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Rantauprapat
220	BPS KABUPATEN SOLOK	Kepatuhan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara semester I lingkup KPPN Solok	KPPN Solok
221	BPS KOTA SOLOK	Terbaik kedua Tahun 2022 Kategori Kepatuhan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban LPJ Bendahara semester I tahun 2022 lingkup KPPN Solok	KPPN
222	BPS KABUPATEN MUSI RAWAS	Satker dengan Akselerasi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Lubuklinggau
223	BPS PROVINSI BENGKULU	Satuan Kerja Dengan Kategori Baik Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022	Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
224	BPS KABUPATEN KAUR	Satker dengan Kategori Sangat Baik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022	Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu
225	BPS KABUPATEN KAUR	Peringkat 2 Satker dengan capaian Nilai IKPA tertinggi periode s.d Agustus 2022 kategori pagu DIPA Sedang	KPPN Manna
226	BPS KOTA BANDAR LAMPUNG	Dedikasi Sistem Statistik Nasional	Walikota Bandar Lampung
227	BPS KABUPATEN BANGKA BARAT	Peringkat Pertama Bendahara Penerimaan Satker Terbaik dalam Penyampaian Semester I Tahun 2022	KPPN
228	BPS KABUPATEN BLORA	Nilai IKPA terbaik ke 2 Semester 1 2022	KPPN Purwodadi
229	BPS KABUPATEN BLORA	Terbaik 3 Penyampaian LPJ Bendaharan Smt 1 2022	KPPN Purwodadi
230	BPS KABUPATEN BLORA	Terbaik 1 Penyampaian Laporan Keuangan Smt 1 2022	KPPN Purwodadi
231	BPS KABUPATEN SITUBONDO	Satuan Kerja Terresponsif dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Bappeda Situbondo
232	BPS KABUPATEN TUBAN	Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022	Bapenda Provinsi Jawa Timur
233	BPS KOTA TANGERANG SELATAN	Satker Terbaik Realisasi Capaian Output Satker Besar Semester 1 2022	KPPN Tangerang
234	BPS PROVINSI BALI	Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2022 Tercepat Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali	Kanwil DJPb Provinsi Bali
235	BPS KABUPATEN BULELENG	Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar	KPPN Singaraja
236	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	UAPPA-W Terbaik Ketiga dalam Penyusunan dan Penyampaian LK TA 2021 Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB	DJPb Provinsi NTB
237	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	IKPA Terbaik 3 Semester I Tahun 2022 Kategori Pagu Sedang	Kanwil DJPb NTT
238	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Terbaik Kedua Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Semester I Tahun 2022	Kanwil DJPb Kupang

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
239	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT	Satuan Kerja Peringkat 2 dengan Penyampaian SPM Gaji Induk Tercepat	KPPN Waingapu
240	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT	Satuan Kerja Peringkat Ketiga dengan Pagu Sedang dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi	KPPN Waingapu
241	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR	Sebagai Peringkat I Pertama Satuan Kerja Pengguna CMS dan Kartu Debit Bendahara Terbanyak	KPPN Waingapu
242	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR	Peringkat 2 Satuan Kerja Pagu Sedang Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (Ikpa) Tertinggi	KPPN Waingapu
243	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR	Peringkat Ke 3 Satuan Kerja Dengan Penyampaian Spm Gaji Induk Tercepat	KPPN Waingapu
244	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR	Peringkat 2 Satuan Kerja Dengan Penyampaian Hardcopy Spm Tercepat Dan Lengkap	KPPN Waingapu
245	BPS KABUPATEN KETAPANG	Satker Kerja Terhandal dalam Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I 2022	KPPN Ketapang dan Pemda Kab. Ketapang
246	BPS KOTA SINGKAWANG	Satker Kinerja Terbaik IKPA Semester I Tingkat KKPN Singkawang	KPPN Singkawang
247	BPS KOTA TOMOHON	Penghargaan Atas Partisipasi Sebagai Peserta Pameran Tomohon Expo 2022	Pemerintah Kota Tomohon
248	BPS KABUPATEN BUOL	Piagam penyelenggaraan kegiatan pembinaan statistik sektoral di Kabupaten Buol Tahun 2022	Diskominfo Kabupaten Buol
249	BPS KABUPATEN WAJO	Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	Pemda Kab Wajo
250	BPS KABUPATEN MUNA	Peringkat Pertama Satker Lingkup Kppn Rahadalam Penilaian Pertanggungjawaban Bendahara Semester I 2022	Kkpn Raha
251	BPS KABUPATEN KOLAKA	Juara Harapan 2 Lomba Kebersihan Lingkungan Kategori Instansi Vertikal (16 Agustus 2022)	Bupati Kolaka
252	BPS KOTA BAUBAU	Mitra Kerja Praktek Kerja Lapangan anggakatan V Tahun 2022/2023	Universitas Muhammadiyah Buton
253	BPS KABUPATEN MALUKU TENGGARA	Kepatuhan Pelaporan SPT	KP2KP Langgur

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
254	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	Satker dengan Nilai IKPA Terbaik Ketiga Semester I Tahun 2022 Kategori Pagu DIPA di atas Rp 12M s.d 30 M	KPPN Manokwari
255	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	Satker dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Ketiga Semester I Tahun 2022 Kategori Pagu DIPA di Atas Rp 10M s.d Rp 20M	KPPN Manokwari
256	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	PPSPM dengan Kinerja Terbaik Pertama Semester I Tahun 2022 Kategori Jumlah SPM 101 sd 200 SPM	KPPN Manokwari
257	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	Satker dengan Transaksi KKP Terbesar Kedua Semester I Tahun 2022	KPPN Manokwari
258	BPS KABUPATEN FAKFAK	Peringkat 3 Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2022 Kategori Pagu 2 -10 M	KPPN Fakfak
259	BPS KABUPATEN KAIMANA	Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) Triwulan II Tahun Anggaran 2022	KPPN Fakfak
260	POLSTAT STIS	Juara 1 Lomba Debat Harmoni Cinta Guru 2022	UNJ
261	PUSDIKLAT BPS	Peringkat II Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Berprestasi Tahun 2022 dengan Tema Human Capital Strategic Partnership	LAN Republik Indonesia
		September	
262	BPS KABUPATEN BENER MERIAH	Capaian Nilai Sempurna (100) Kategori Deviasi Halaman III Terbaik Periode Semester 1 Tahun 2022	KPPN Takengon
263	BPS KABUPATEN BENER MERIAH	Peringkat I Kategori Pengelolaan Anggaran Terbaik Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Takengon
264	BPS KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	Terbaik Pertama Paper akselerasi Pemulihan Ekonomi UMKM Melalui Transformasi Digital Paska Pandemi Covid -19 di Pulau Sumatera Utara	Bank Indonesia
265	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan dalam Focused Group Discussion Kajian dan Analisis Ekonomi Regional Pasaman Barat Triwulan 3 2022	KPPN Lubuk Sikaping
266	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Peringkat I Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2022	KPPN Manna

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
267	BPS KABUPATEN SELUMA	Satker dengan capaian nilai IKPA tertinggi sampai dengan bulan Agustus 2022	KPPN Manna
268	BPS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	BPS Kabupaten Lampung Tengah atas kerjasamanya Dalam Penyajian Data untuk Program Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Tengah	Bupati Lampung Tengah
269	BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Terbaik Ke- III Penyusunan Laporan Keuagan Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2021	Kanwil DJPb Bangka Belitung
270	BPS KABUPATEN SRAGEN	Petugas Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Sragen
271	BPS PROVINSI DI YOGYAKARTA	Satker UAPPA-W Terbaik Pertama "LKKL Awards" Tahun 2021_Kategori 4 sampai 6 Satuan Kerja	Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta
272	BPS KABUPATEN SITUBONDO	Capaian Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 oleh Seluruh ASN BPS Kabupaten Situbondo sebesar 100%	KPP Pratama Situbondo
273	BPS KABUPATEN SITUBONDO	Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2021	KPP Pratama Situbondo
274	BPS PROVINSI BALI	Implementasi Gerakan Zero Retur Periode Semester I Tahun Anggaran 2022	Kanwil DJPb Provinsi Bali
275	BPS KABUPATEN KARANG ASEM	Peringkat Pertama Kinerja Kualitas Laporan Keuangan Satker Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Amlapura
276	BPS KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Peringkat 1 Laporan Keuangan tingkat UAKPA Satker Lingkup KPPN Sumbawa Besar	KPPN Sumbawa Besar
277	BPS KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Piagam Penghargaan Sebagai pembina Statistik Sektoral Pada kegiatan pendataan Jamban Sehat Kab. Sumbawa Barat Tahun 2022	Diskominfo Kab. Sumbawa Barat
278	BPS KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Peringkat I Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker Lingkup KPPN Sumbawa Besar semester I Tahun 2022 dengan Nilai 99.34	KPPN Sumbawa Besar
279	BPS KABUPATEN KAPUAS HULU	Penghargaan Nilai IKPA Tingkat Satker Lingkup KPPN Putussibau	KPPN

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Periode Semester 1 Tahun 2022 Kategori Pagi diatas 6M	
280	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Terbaik Ketiga Implementasi Kartu Kredit Pemerintah	KPPN Barabai
281	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Rekonsiliasi Rekening Tercepat Semester I Tahun 2022	KPPN Tanjung
282	BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Realisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Semester I Tahun 2022	KPPN Tanjung
283	BPS KABUPATEN MINAHASA	Goverment Best Production	Hotel Arya Duta
284	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	Satker dengan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan secara Tepat dan Cepat Periode Januari 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
285	BPS KABUPATEN TOLI-TOLI	Narasumber dalam Kegiatan FGD Data Analitik - Analisis Ekonomi Regional	KPPN Tolitoli
286	BPS KOTA PALU	Terbaik Pertama Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Cepat Periode September 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
287	BPS KABUPATEN JENEPONTO	Piagam Pencanangan Desa Cinta Statistik	Pemda Kabupaten Jeneponto
288	BPS KABUPATEN JENEPONTO	Piagam Pembangunan Zona Integritas	Pemda Kabupaten Jeneponto
289	BPS KABUPATEN JENEPONTO	Piagam Penghargaan Juara Pengelola Keuangan Terispiratif - Pengelolaan dan Penggunaan KKP	KPPN Bantaeng
290	BPS KABUPATEN KOLAKA	Peringkat 1 Nilai IKPA Semester 1 2022 (29 September 2022)	DJPB Prov. Sulawesi Tenggara
291	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	Piagam Penghargaan Pembinaan Agen Statistik dan Statistik Khusus Universitas Sulawesi Barat	Universitas Sulawesi Barat
292	BPS KABUPATEN MAJENE	Upaya Pembinaan Agen Statistik dan Statistik Khusus di Universitas Sulawesi Barat	Universitas Sulawesi Barat
293	BPS KABUPATEN BURU	Partisipasi sebagai Pembina Statistik Daerah	Pemda Kabupaten Buru
294	BPS KOTA SORONG	Juara III Belanja Up Terbesar Digipay Periode Semester I Tahun 2022	Bank BRI dan KPPN Sorong

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
295	POLSTAT STIS	Juara 1 Nacoesta Essay Competitions	Universitas Muhammadiyah Semarang
Oktober			
296	BPS KABUPATEN BENER MERIAH	Capaian Nilai Sempurna (100%) Periode Semester I TA 2022	KPPN Takengon
297	BPS KABUPATEN AGAM	Tenaga Ahli Penilaian Indeks Tata Kelola Polres 2022	Polres Agam
298	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan 2022 dalam Komitmen Dalam Perlindungan Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan
299	BPS KOTA PAYAKUMBUH	Peringkat I Pelaporan Data Capaian Output Periode Triwulan III 2022	KPPN Bukittinggi
300	BPS KOTA PAYAKUMBUH	Kuasa Pengguna Anggaran Satker Peringkat I Pelaporan Data Capaian Output Periode Triwulan III 2022	KPPN Bukittinggi
301	BPS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Zero Retur TW III Tahun 2022	KPPN Kuala Tungkal
302	BPS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	Nilai IKPA Terbaik TW III Tahun 2022	KPPN Kuala Tungkal
303	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	Responden terbaik kategori Instansi Penyedia Data Rutin dan Adhoc Terbaik	BI Provinsi Sumatera Selatan
304	BPS KABUPATEN REJANG LEBONG	Peringkat Pertama Satker Kinerja Terbaik Berdasarkan Kepatuhan Pelaporan & Pertanggungjawaban APBN Ta 2022	KPPN
305	BPS KABUPATEN LEBONG	Satker Terbaik IKPA Tahun 2022 Peringkat Pertama Satuan Kerja Kategori Pagu Besar	KPPN Curup
306	BPS PROVINSI JAWA BARAT	Peringkat Pertama - Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021	Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat
307	BPS PROVINSI JAWA TENGAH	Terbaik Kedua Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021 Lingkup Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Kanwil DJPB Jateng
308	BPS KOTA SEMARANG	Satker Terbaik Ke 2 Kategori Penilaian IKPA Semester 1 Tahun 2022	KPPN Semarang II
309	BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Peringkat Kedua Penilaian LKKL Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Sedang Lingkup Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Barat TA 2021	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
310	BPS KABUPATEN SUKAMARA	Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sangat Baik Periode Triwulan III Tahun 2022	KPPN Pangkalan Bun
311	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Peringkat 1 Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester 1 TA 2022	KPPN Tanjung Selor
312	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Peringkat 2 Penyampaian LPJ Bendahara sd Semester 1 TA 2022	KPPN Tanjung Selor
313	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Terbaik	KPPN Tanjung Selor
314	BPS KABUPATEN MALINAU	Peringkat 2 IKPA Terbaik Semester I Tahun 2022	KPPN Tanjung Selor
315	BPS KOTA PALU	Pencapaian Terbaik Ketiga Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Cepat Periode Oktober 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
316	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Tokoh Birokrat Inovatif 2022 dalm Sultra Award 2022	Kendari Pos
317	BPS KABUPATEN BOALEMO	Peringkat III IKPA Tertinggi Sem.I 2022-KPPN	KPPN Marisa
318	BPS KABUPATEN BOALEMO	Peringkat III Penyampaian LK Semester I 2022-KPPN	KPPN Marisa
319	BPS KABUPATEN BOALEMO	IKPA Terbaik Smst 1 Peringkat 3 Th 2022	KPPN Marisa
320	BPS KABUPATEN BOALEMO	Ketepatan Penyampaian LK Smst 1 Th 2022 Terbaik III	KPPN Marisa
321	BPS KABUPATEN POHUWATO	Peringkat Kedua Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1 2022	KPPN Marisa
322	BPS KABUPATEN KAIMANA	Penghargaan IKPATriwulan Iii Tahun Anggaran 2022 Bagi Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Fakfak	KPPN Fak-Fak
323	POLSTAT STIS	Juara 1 Lomba Info Grafis pada Acara SPSS 2022	Binus University
324	POLSTAT STIS	Juara 1 Lomba Analisis Data Nasional Statistics Challenge 2022	Universitas Brawijaya
November			
325	BPS PROVINSI ACEH	Peringkat II IKPA Terbaik Triwulan II Tahun 2022 Katagori K/L Besar	Kanwil DJPB Aceh
326	BPS PROVINSI ACEH	Peringkat I Terbaik Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-	Kanwil DJPB Aceh

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		W Tahun 2021 Katagori UAPPA-W Besar	
327	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA	Pelaksanaan Apbn Melalui Implementasi Cashless Society Tahun 2022	Kanwil DJPB Sumatera Utara
328	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
329	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Perigkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Instansi Vertikal	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
330	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Achievement Motivation Person 2022, Ir. Herum Fajarwati, M.M	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
331	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Piagam Penghargaan Kerjasama dalam Seminar Nasional dengan Tema "Outlook Ekonomi dan Pengangguran Terkini Indonesia"	Universitas Andalas
332	BPS KABUPATEN AGAM	Peran Aktif Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mitra Statistik BPS Kabupaten Agam Tahun 2022	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
333	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan dalam Focused Group Discussion Kajian dan Analisis Ekonomi Regional Pasaman Barat Triwulan 4 2022	KPPN Lubuk Sikaping
334	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Sertifikat Penghargaan 2022 BPS Core Value dan Employer Branding ASN	PPSDM Regional Bukittinggi
335	BPS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Pengguna Marketplace-Digipay	KPPN Kuala Tungkal
336	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Tahun 2022	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
337	BPS PROVINSI BENGKULU	Peringkat III Satuan Kerja Terbaik Kategori Penilaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan	KPPN Bengkulu
338	BPS KABUPATEN KARIMUN	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Kepuluan Riau
339	BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
340	BPS KOTA SALATIGA	Kontribusi dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2020 dan 2021	
341	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	Karya Terpilih V Public Sector (PUB) dalam Kompetisi Indonesia Enterpreneur TIK 2022	Kominfo Republik Indonesia
342	BPS KOTA MOJOKERTO	Peringkat III sebagai Satker Pengguna UP KKP Tertinggi Tahun Anggaran 2022	KPPN Mojokerto
343	BPS PROVINSI BANTEN	Kategori Lembaga Informatif	Komisi Informasi Provinsi Banten
344	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Peringkat I Informatif dalam Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
345	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Peringkat ketiga atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah
346	BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Penghargaan Persentase Tertinggi Kedua Jumlah dan Keterisian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Tahun 2022	Pemerintah Provinsi KalimantanTimur
347	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Mitra Strategis Terkolaboratif Dalam Mendukung Pemulihan/Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
348	BPS KABUPATEN MALINAU	Peringkat 3 Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2022	KPPN Tanjung Selor
349	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH	Satuan Kerja dengan Kategori Kinerja Penyusunan LK UAPPA - W Tahun Anggaran 2021 Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah
350	BPS KOTA PALU	Pencapaian Terbaik Kedua Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Cepat Periode Nopember 2022 Tingkat Satker Lingkup KPPN Palu	KPPN Palu
351	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN	Juara 1 Kompetisi Penulisan Artikel Perekonomian Daerah Prov Sulsel	BI Provinsi Sulawesi Selatan
352	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN	Kompetisi Penulisan Artikel Perekonomian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	BI Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
353	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Juara II Kompetisi Penulisan Artikel Perekonomian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kategori Organisasi Perangkat Daerah Subtema Perikanan	BI Provinsi Sulawesi Selatan
354	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Juara I Kompetisi Penulisan Artikel Perekonomian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kategori Organisasi Perangkat Daerah Subtema Konstruksi	BI Provinsi Sulawesi Selatan
355	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Award Sahabat Data BI Sultra dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	BI Provinsi Sulawesi Tenggara
356	BPS PROVINSI GORONTALO	Mitra Pengendali Inflasi Terkolaboratif Wilayah Gorontalo Tahun 2022 Kategori Instanti Vertikal	BI Provinsi Gorontalo
357	BPS KOTA GORONTALO	Penghargaan Dukcapil Kota Gorontalo Atas Dukungan dalam Penyediaan Data dan Statistik Kependudukan di Kota Gorontalo Tahun 2022	Disdukcapil Kota Gorontalo
358	BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA	Penilaian IKPA Semester I Tahun Anggaran 2022	KPPN Mamuju
359	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	Mitra Strategis Terkolaboratif dalam Mendukung Pemulihan/Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Papua Barat Tahun 2022	BI Provinsi Papua Barat
360	POLSTAT STIS	Juara 1 Expose Statistic Chalenge On Nation (EPSILON)	Universitas Negeri Padang
361	POLSTAT STIS	Juara 1 Olimpiade Statistika SPSS 2022	HIMSTAT Universitas Bina Nusantara
Desember			
363	BPS KABUPATEN SIMEULUE	Satuan Kerja Dengan Kinerja IKPA Sangat Baik Tahun 2022	KPPN Meulaboh
364	BPS KABUPATEN NAGAN RAYA	Satuan Kerja Terbaik Semester 2 Tahun 2022 Mitra Kerja KPPN Meulaboh	KPPN Meulaboh
365	BPS KABUPATEN ACEH JAYA	Satuan Kerja dengan Kinerja IKPA Sangat Baik Tahun 2022	KPPN Meulaboh
366	BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA	Satker Lingkup KPPN Balige Dengan Nilai Ikpa Terbaik-Ii Kategori Dipa Pagu Sedang Periode Triwulan III Tahun 2022	KPPN Balige

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
367	BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA	Satker Lingkup KPPN Balige Dengan Jumlah Transaksi 1 Kategori Penghargaan Penggunaan KKP Periode Triwulan III Tahun 2022	KPPN Balige
368	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ke SPRINT Periode Januari - November 2022	KPPN Rantauprapat
369	BPS KABUPATEN ASAHAN	Sebagai Mitra KPP Pratama dalam Pengelolaan Data Instansi,Lembaga,Asosiasi dan Pihak Lain Tahun 2022	KPP Pratama Kisaran
370	BPS KABUPATEN DAIRI	Terbaik Kedua Kategori Administrasi BMN Yang Andal 2022	Kanwil DJKN Sumatera Utara
371	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Piagam Penghargaan Dukungan yang Telah Diberikan dalam Menyukseskan Pencanangan Kabupaten Sijunjung Menuju Kabupaten Statistik	Bupati Kabupaten Sijunjung
372	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Piagam Penghargaan Pembinaan Statistik Pada Survei Pendapatan Petani Hutan Tahun 2022	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
373	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Pembinaan Statistik Tentang Perhitungan NTP Kota Padang Selama Tahun 2021-2022	Fakultas Pertanian Universitas Andalas
374	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	Layanan Statistik berupa Pojok Statistik di Universitas Negeri Padang pasa Tahun 2022	Universitas Negeri Padang
375	BPS KABUPATEN SIJUNJUNG	Dukungan yang telah diberikan dalam menyukseskan Pencanagna Kabupaten Sijunjung	Bupati Kab. Sijunjung
376	BPS KABUPATEN AGAM	Dedikasi dan Kontribusi Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Agam
377	BPS KABUPATEN AGAM	Pembina Data Sektoral Dalam Forum Satu Data Kabupaten Agam Tahun 2022	Diskominfo Kabupaten Agam
378	BPS KABUPATEN PASAMAN BARAT	Penghargaan dalam Peran serta dan kontribusi dalam Kajian dan Analisis Ekonomi Regional Pasaman Barat 2022	KPPN Lubuk Sikaping
379	BPS KOTA PAYAKUMBUH	Peran Aktif dan Kepeduliannya terhadap Perlindungan Seluruh Mitra Statistik kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lima Puluh Kota

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
380	BPS PROVINSI RIAU	Peringkat Informatif (Kategori Badan Publik Instansi Vertikal Di Provinsi Riau) Pemeringkatan Dan Penganugrahan Badan Publik Se-Provinsi Riau Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Riau
381	BPS PROVINSI JAMBI	Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Kategori Badan Publik Instansi Vertikal	Komisi Informasi Provinsi Jambi
382	BPS PROVINSI JAMBI	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kemenpan RB
383	BPS KOTA SUNGAI PENUH	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Jambi
384	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	Peringkat 1 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Lingkup Kementrian/Lembaga Tahun 2022	Kemenpan RB
385	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Satker Dengan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup KPPN Lahat Periode Triwulan I Tahun 2022	KPPN Lahat
386	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Kegiatan PL-KUMKM di Kabupaten Muara Enim Tahun 2022	Dinas KUKM Kabupaten Muara Enim
387	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Harmonisasi Dalam Penyediaan Data Statistik Sebagai Pendukung Kelancaran Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim	DPMPSP Kabupaten Muara Enim
388	BPS KABUPATEN MUARA ENIM	Koordinasi dan Harmonisasi Yang Baik Dalam Penyedia Data Statistik Untuk Kemajuan Kabupaten Muara Enim	Pj. Bupati Muara Enim
389	BPS KABUPATEN LAHAT	Peringkat III IKPA satker kategori Pagu Besar (diatas 5 Milyar) Lingkup KPPN Lahat Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Lahat
390	BPS KABUPATEN LAHAT	Pembina Desa Cantik (Cinta Statistik) di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Gumay Talang	Desa Tanjung Beringin
391	BPS KABUPATEN LAHAT	Penghargaan sebagai pembina desa cantik dari Dinas PMD	Dinas PMD
392	BPS KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Peringkat 3 Satker Mitra KPPN Sekayu dengan Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif	KPPN Sekayu

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
393	BPS KABUPATEN BANYU ASIN	Peringkat III Satuan Kerja Mitra KPPN Sekayu Dengan Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Teraktif Tahun Anggaran 2022 dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Banyuasin	KPPN Sekayu
394	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Satker Dengan Pelaksanan Anggaran Terbaik Ke-2 Kategori Pagu Tinggi	KPPN
395	BPS PROVINSI BENGKULU	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Bengkulu	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
396	BPS KABUPATEN KEPAHIANG	TPAKD Award 2022	OJK Provinsi Bengkulu
397	BPS PROVINSI LAMPUNG	Badan Publik yang Patuh Menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Lampung
398	BPS KOTA METRO	Partisipasi sebagai Narasumber	Diskominfo Kota Metro
399	BPS KOTA METRO	Reksa Bandha Terbaik 1 untuk kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
400	BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Atas Capaian Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Terbaik Lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022	Kanwil DJPB Kep. Bangka Belitrung
401	BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 kategori Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
402	BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Selaku Pembina Statistik Sektoral di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas	Kemenag Kabupaten Kepulauan Anambas
403	BPS KOTA TANJUNG PINANG	Keterbukaan Informasi Publik 2022	Komisi Informsi Provinsi Kepulauan Riau
404	BPS KOTA JAKARTA BARAT	Partisipasi dalam menunjang transaksi cashless	PT.BNI (Persero) TBK, Cabang Pecenongan
405	BPS KABUPATEN CIANJUR	Satker Terbaik Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Wil KPPN Purwokerto)	Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan
406	BPS KABUPATEN SUBANG	Peringkat Pertama Atas Capaian Transaksi Belanja Menggunakan Platform Digital Payment	KPPN Purwakarta
407	BPS KOTA DEPOK	Katagori Satker Yang Telah memenuhi Standar Kompetensi	KPPN Bogor

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengelola Keuangan Khususnya PPK dan PPSPM	
408	BPS KABUPATEN CILACAP	Satker Terbaik Pertama Pemakaian Sistem Digipay Triwulan III Tahun 022	KPPN Cilacap
409	BPS KABUPATEN BANJARNEGARA	Penghargaan Dalam pengunaan UP Bendahara Pengeluaran Melalui DIGIPAY-Marketplace di Lingkungan Satker Wilayah Kerja KPPN Banjarnegara Periode Semester I Tahun 2022	KPPN Banjarnegara
410	BPS KABUPATEN BANJARNEGARA	Terbaik II dalam Penghimpunan Metadata Statistik Sektoral Tahun 2022 di lingkup BPS Provinsi Jawa Tengah	KPPN Banjarnegara
411	BPS KABUPATEN BANJARNEGARA	Sebagai Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 satker lingkup KPPN Banjarnegara wilayah Banjarnegara	KPPN Banjarnegara
412	BPS KABUPATEN WONOSOBO	Terbaik III Laporan keuangan Triwulan III	KPPN Banjarnegara
413	BPS KABUPATEN KLATEN	Kompetensi Pejabat Perbendaharaan	KPPN Klaten
414	BPS KABUPATEN KARANGANYAR	Survei Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tahun 2022	Kesbangpol Kabupaten Karanganyar
415	BPS KOTA MAGELANG	Satuan Kerja Terbaik Pertama Implementasi Penggunaan Digipay-Marketplace s.d. 30 Oktober Tahun 2022	KPPN Magelang
416	BPS KOTA MAGELANG	Satuan Kerja Terbaik Ketiga Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun 2022	KPPN Magelang
417	BPS KABUPATEN TRENGGALEK	Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA TA 2022 Kategori Pagu > 15 Milyar	KPPN Kediri
418	BPS KABUPATEN TUBAN	Peringkat I Penyampaian Lpj Bendahara Pengeluaran Tercepat Periode Tw Iii Ta 2022 Di Lingkup Kppn Tuban	KPPN TUBAN
419	BPS KOTA BLITAR	Satuan Kerja Terbaik II Kategori Penyampaian Berkas SPM Tercepat dan Lengkap Tahun Anggaran 2022	KPPN Blitar
420	BPS PROVINSI BANTEN	Kerjasama dan Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah	BPKAD Prov Banten

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
421	BPS PROVINSI BALI	Badan Publik dengan Predikat Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
422	BPS KABUPATEN JEMBRANA	Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Kemenpan RB
423	BPS KABUPATEN TABANAN	Penyelesaian Lebih Awal Migrasi Data Persediaan Aplikasi SAKTI Tahun 2022 Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali	Kanwil DJPb Provinsi Bali
424	BPS KABUPATEN BADUNG	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
425	BPS KABUPATEN GIANYAR	Anugrah keterbukaan publik sebagai satker informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
426	BPS KABUPATEN BANGLI	Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
427	BPS KABUPATEN BULELENG	Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
428	BPS KOTA DENPASAR	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif	Komisi Informasi Provinsi Bali
429	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB 2022 Sebagai Badan Publik Vertikal (Informatif)	Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
430	BPS KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Pembinaan Statistik Sektoral Pada OPD Pemda Lombok Tengah	Diskominfo
431	BPS KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Peringkat II Kinerja Pengelolaan APBN Kategori Pagu Di Atas Rp 10 Miliar Periode Semester II TA 2022	KPPN Selong
432	BPS KABUPATEN DOMPU	Satker Terbaik Pertama Penggunaan Marketplace Digipay Tahun Anggaran 2022	KPPN Bima
433	BPS KABUPATEN BIMA	Terbaik Ketiga Penggunaan Marketplace Digipay Tahun Anbggaran 2022	DJPB
434	BPS KABUPATEN BIMA	Terbaik Ketiga Penyampaian Rekon LK dan LPJ Bendahara	DJPB
435	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik 3 Tingkat Wilayah s.d Triwulan III 2022	Kanwil DJPB NTT
436	BPS KABUPATEN SUMBA TIMUR	Sebagai Satker Pengunaan CMS Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Tahun 2022	BRI Cabang Waingapu
437	BPS KABUPATEN KAPUAS HULU	Narasumber dalam acara "Focus Group Discussion (FGD) Data	KPPN Putussibau

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Analytics - Analisis Ekonomi Regional"	
438	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Predikat WBK Tahun 2022	Kemenpan RB
439	BPS KABUPATEN TAPIN	Peringkat ketiga pada kategore nominal transaksi terbanyak pada implementasi DIGIPAY lingkup KPPN Barabai	KPPN Barabai
440	BPS KOTA BONTANG	Pembina Data Kota Bontang Tahun 2022	Diskominfo Kota Bontang
441	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara
442	BPS KABUPATEN TOLI-TOLI	Narasumber dalam Kegiatan Data Analytics - Analisis Ekonomi Regional yang Diselenggarakan oleh KPPN Tolitoli	KPPN Tolitoli
443	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN	Piagam pelestarian lingkungan	Pt. Uwaaa Daur Ulang
444	BPS KABUPATEN JENEPONTO	Piagam atas Kolaborasi dan Sinergi dengan KPPN Bantaeng dalam mendukung Regional Chief Economist	KPPN Bantaeng
445	BPS KABUPATEN JENEPONTO	Piagam Penghargaan Jeneponto Award 2022	Pemerintah Kabupaten Jeneponto
446	BPS KABUPATEN SOPPENG	Apresiasi atas kontribusinya sebagai Penyedia Data Pertanian Tanaman Pangan , Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng
447	BPS KABUPATEN SOPPENG	Atas kontribusinya sebagai Pembina Statistik Sektoral pada Acara Sosialisasi Penyelenggaran Statistik Sektoral di Kabupaten Soppeng	Diskominfo Kabupaten Soppeng
448	BPS KABUPATEN WAJO	Piagam Pelestarian Lingkungan	Pt. Uwaaa Daur Ulang
449	BPS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	Piagam Pelestarian Lingkungan	Pt. Uwaaa Daur Ulang
450	BPS KABUPATEN LUWU UTARA	Pembinaan Statistik Sektoral	Bappelitbangda Kabupaten Luwu Utara
451	BPS KABUPATEN LUWU UTARA	Penyediaan Data Statistik	Bupati Kabupaten Luwu Utara
452	BPS KABUPATEN LUWU TIMUR	Piagam Pelestarian Lingkungan	Pt. Uwaaa Daur Ulang
453	BPS KABUPATEN BUTON	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran	KPPN

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)
		Triwulan III Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Besar	
454	BPS KABUPATEN KOLAKA	Peringkat 1 Pengguna Marketplace-Digipay	KPPN Kolaka
455	BPS KABUPATEN KOLAKA	Peringkat 2 Pengguna Cash Management System	KPPN Kolaka
456	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	Terbaik 1 IKPA Triwulan 3 Kategori Pagu Sedang	KPPN Baubau
457	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Pengguna marketplace - Digipay Tahun 2022	KPPN Kolaka
458	BPS KABUPATEN KOLAKA TIMUR	Peringkat 1 Pengguna Cash Management System Tahun 2022	KPPN Kolaka
459	BPS KABUPATEN BOALEMO	WBK 2022	Kemenpan RB
460	BPS KABUPATEN GORONTALO	Penghargaan Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Penyampaian Rekonsiliasi Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Gorontalo	KPPN Gorontalo
461	BPS KABUPATEN GORONTALO	Penghargaan Peringkat Pertama petugas Satuan Kerja Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022 se-Provinsi Gorontalo dari KPPN Gorontalo	KPPN Gorontalo
462	BPS KOTA GORONTALO	Penghargaan BAPPPEDA Kota Gorontalo Atas Koordinasi dan Penyiapan Data Tepat Waktu Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022	Bappeda Kota Gorontalo
463	BPS KOTA GORONTALO	Penghargaan Wali Kota Gorontalo Atas Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Urusan Statistik dan Administrasi Kependudukan Tahun 2022	Wali Kota Gorontalo
464	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	Piagam Penghargaan Pembina Statistik Sektoral Desa pada Lokus Data Desa Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	Pj. Gubernur Sulawesi Barat
465	BPS PROVINSI MALUKU	Sinergi dan Kolaborasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai Provinsi Maluku Tahun 2022	Kantor Wilayah DJBC Maluku
466	POLSTAT STIS	Juara 2 ADTN (Analisis Data Tingkat Nasional) Halu Oleo Statistics Competition	Universitas Halu Oleo

Lampiran 12.

Daftar Inovasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2022

No.	Nama Satker/Unit Kerja	Inovasi
(1)	(2)	(3)
1	DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT	Melakukan pengembangan penghitungan indikator menggunakan metode statistik Small Area Estimation (SAE) untuk menyediakan indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Inovasi ini dilakukan bersama Politeknik STIS dengan membangun Rpackage untuk mempermudah penghitungan SAE.
2	DIREKTORAT STATISTIK DISTRIBUSI	Automasi interoperabilitas data angkutan laut melalui Application Programming Interface (API) dengan PT Pelindo (Persero).
3	DIREKTORAT STATISTIK DISTRIBUSI	SIPADUS (Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Distribusi) Aplikasi ini mengakomodasi penggunanya untuk memproses penciptaan naskah dinas, penyimpanan arsip, dan berbagi-pakai arsip agar menjadi lebih mudah dan sederhana.
4	DIREKTORAT NERACA PRODUKSI	Pengembangan SUT berbasis Website untuk memudahkan proses kerja penyusunan Supply and Use Tables (SUT). Sistem ini berfungsi untuk mengelola penyusunan tabel SUT secara terintegrasi, dari proses menginput data, proses rekonsiliasi angka, hingga analisis makro sederhana.
5	KEDEPUTIAN NAS	Pembuatan dan implementasi sistem rekonsiliasi PDB melalui aplikasi New Verdana
6	KEDEPUTIAN NAS	Pembuatan dan pengembangan SIREPORTER (Sistem Rekonsiliasi PDB/PDRB Online Terintegrasi)
7	DIREKTORAT NERACA PRODUKSI	Membentuk Survei Neraca Terintegrasi (SINASI) untuk mengintegrasikan tiga survei khusus neraca produksi
8	DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	Penyusunan Tata Kelola Big Data
9	PROVINSI SUMATERA BARAT	Aplikasi monitoring dan penilaian kinerja kabupaten/kota (simonika). Merupakan Sistem monitoring dan penilaian terhadap kinerja BPS Kabupaten/Kota setiap bulan
10	KAB. SOLOK SELATAN	Sistem monitoring dan informasi anggaran (siminang) solok selatan. Merupakan sistem yang dapat memberikan informasi terhadap perencanaan berupa jadwal kegiatan, permintaan penggunaan anggaran, perjalanan dinas, permintaan bahan bakar minyak, permintaan service kendaraan dinas, dan capaian kegiatan berupa realisasi anggaran, laporan kegiatan pendataan, pengolahan, rapat, dan laporan perjalanan dinas.

No.	Nama Satker/Unit Kerja	Inovasi
(1)	(2)	(3)
11	KAB. SOLOK SELATAN	Sistem penilaian mitra statistik (silaras). Merupakan aplikasi web yang dapat mengakomodir penilaian terhadap mitra sebagai pertimbangan penggunaan jasa mitra tersebut kedepan nya. Aplikasi ini juga merupakan database mitra yang terintegrasi dan dapat diunduh sebagai dasar pembuatan SPJ, BAST, Maupun kontrak kerja.
12	KAB. PASAMAN BARAT	INTAN (input kegiatan). Merupakan aplikasi yang menyajikan informasi kegiatan pegawai BPS Kabupaten Pasaman Barat, baik yang di kantor maupun yang dilapangan sehingga memudahkan pimpinan untuk memonitoring kegiatan pegawai dan memudahkan bagian umum untuk merekap absensi pegawai sebagai pertanggungjawaban terhadap anggaran dan untuk meningkatkan disiplin serta motivasi pegawai.
13	KAB. PASAMAN BARAT	BPS Kabupaten Pasaman Barat selaku instansi yang bekerja di bidang statistik menciptakan sebuah dashboard sebagai media informasi mengenai data gempa yang terjadi pada tanggal 25 februari 2022. Data yang tersedia dapat diakses oleh pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum guna memudahkan dalam penyaluran bantuan dan koordinasi pasca bencana.
14	KOTA PADANG PANJANG	Sistem aplikasi manajemen mitra statistik (samsmit). Merupakan sistem informasi yang dibuat untuk Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang dalam membantu penyelenggaraan pengelolaan mitra. SAMSMIT Fokus pada proses perekrutan, seleksi, alokasi dan evaluasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan kegiatan statistik di BPS Kota Padang Panjang.
15	KOTA PADANG PANJANG	Morin. Sistem Informasi Notifikasi Keuangan Money Remindering (Morin) merupakan salah satu sistem informasi yang dibuat dalam mendukung sistem informasi yang ada di BPS Kota Padang Panjang. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk mengatasi masalah yang ada saat pemberitahuan (notifikasi) melalui platform whatsapp mengenai transaksi pembayaran keuangan ke para pegawai.
16	KOTA PADANG PANJANG	Pojok statistik kota padang panjang. Pojok Statistik di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang ini merupakan sebuah pojok di salah satu ruangan Perpusda Kota Padang Panjang yang menyediakan pelayanan data dan informasi Statistik bagi pengunjung perpustakaan. Pojok Statistik ini memudahkan pengunjung perpustakaan/pengguna data untuk mengakses data dan informasi BPS baik tercetak dalam bentuk publikasi tercetak, maupun data digital.
17	KAB. S I A K	Balik kampung. Merupakan sebuah inovasi sekaligus kolaborasi Bersama antara aparat desa dengan insan BPS Kabupaten Siak. Dalam program "Balik Kampung" ini, tim dari BPS Kabupaten Siak bekerja selama sehari di kantor desa dan mengikuti aktivitas kedinasan aparat desa secara aktif. Selama beraktivitas dikantor

No.	Nama Satker/Unit Kerja	Inovasi
(1)	(2)	(3)
		desa, tim dari BPS Siak melakukan diskusi, memberikan masukan/saran dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk kepentingan desa.
18	KOTA SUNGAI PENUH	Mai singgah: virtual office bps kota sungai penuh. Dengan sekali klik melalui gadget/laptop anda bisa terhubung dengan admin BPS Kota Sungai Penuh. Anda bisa berkomunikasi apa saja. Mulai dari pelayanan data, konsultasi statistik, permintaan publikasi, saran dan kritik, dan pelayanan sejenisnya.
19	PROVINSI BENGKULU	Sistem panduan penilaian statsistisi (sipasti). SiPasti dibangun untuk membantu statistisi dalam merencanakan kegiatan dan menyusun DUPAK serta membantu pula penilai dalam melakukan penilaian DUPAK.
20	KAB. MUKOMUKO	Super susenas (strategi dan upaya pengurangan error survei sosial ekonomi nasional)
21	PROVINSI LAMPUNG	Sicakep - sistem informasi capaian kinerja pegawai
22	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Aplikasi input data sub-ksa.ds menggunakan cobocollect. Aplikasi ini dibangun untuk mempermudah inventarisasi data SUB-KSA.DS pada Survei Ubinan Padi berbasis KSA. SUB-KSA.DS adalah formulir isian berupa keterangan data petani calon Responden Survei Ubinan Padi berbasis KSA.
23	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Si ikan kerisi. Sistem Pengendalian Kegiatan Statistik Produksi Terintegrasi. Dengna sistem ini memuat sistem monitoring, rekap deadline survey kegiatan produksi. Dengan begitu setiap pekerjaan akan maksimal selesai sesuai dengan waktunya.
24	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Si dokter super (Sistem Dokumentasi Supervisi). Dengan aplikasi ini, pengguna aplikasi tidak hanya dimudahkan dalam melakukan supervisi tapi juga tersedia semua konsep dan definisi atau materi terkait kegiatan statistik pertanian. Pada kegiatan supervisi ini, tidak hanya terkait teknis, tapi juga memantau SOP pelaksanaan lapangan oleh petugas (PCS/PMS)
25	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Sistem manajemen risiko (simanis). Sistem ini memudahkan pegawai BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengakses semua daftar risiko kegiatan di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	E-sop. Pada aplikasi ini memuat semua SOP semua kegiatan pada BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Aplikasi "Si Pinter UDPP DUTL ST2023", yaitu Sistem Pelatihan Terintegrasi Kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertanian dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya ST2023. Dengan inovasi ini, semua kegiatan pelatihan terintegrasi mulai dari database petugas, materi pelatihan, pelaksanaan kuis/pendalaman, jadwal pelatihan/lapangan, hasil diskusi/penegasan selama pelatihan dan dokumentasi kegiatan lapangan termasuk supervisi.

No.	Nama Satker/Unit Kerja	Inovasi
(1)	(2)	(3)
28	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Arema babel (Ayo Rekan Membunyikan Angka). Dibuat dengan google studio, sehingga melihat seberapa banyak tulisan rekan-rekan Babel sudah menulis opini publik
29	PROVINSI DKI JAKARTA	Sistem layanan statistik terpadu (silatipa). Aplikasi ini menampilkan produk Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Data-data yang telah diunduh dapat dibuka tanpa harus menggunakan koneksi internet.
30	KOTA SURAKARTA	E-spj. Aplikasi e-spj dimaksudkan untuk mempercepat proses pembuatan SPJ, membuat SPJ paperless, mendapatkan SPJ yang tepat yang benar, pemeriksaan SPJ yang lebih teliti, dan bisa mendapatkan gambaran mengenai honor mitra (terutama) terkait dengan ketentuan SBML
31	PROVINSI JAWA TIMUR	Sistem pemanfaatan data konstruksi (si-pendaki)
32	PROVINSI JAWA TIMUR	I pro you: mendukungmu untuk tingkatkan kapasitas dan kembangkan profesi saat pandemi dengan knowledge management system
33	PROVINSI JAWA TIMUR	Mister j: mobile integrated statistical service of jawa timur
34	KAB. BLITAR	Sistem integrasi bps kab. blitar link. Website yang berisi tautan/link untuk pembuatan nomor surat, pengumpulan dokumen kinerja pegawai, monitoring operasional kendaraan, pengumpulan bukti dan dokumentasi kegiatan BPS Kabupaten Blitar.
35	KAB. BONDOWOSO	E-library bps bondowoso. Sistem Informasi Perpustakaan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. Website perpustakaan bagi yang mengunjungi perpustakaan dapat mengisi form buku tamu dan data dari pengunjung tersebut nantinya akan tercatat di dalam database. Hal ini memudahkan penanggungjawab perpustakaan dalam pengambilan rekap data.
36	KAB. MAGETAN	Aplikasi entri ubinan magetan. Aplikasi Entri Ubinan Magetan adalah aplikasi berbentu website yang digunakan oleh petugas Ubinan untuk entri data hasil pengumpulan lapangan.
37	KOTA BLITAR	Drsapp (media daftar, rekam, simpan dokumen surat resmi bps kota blitar sebagai solusi tantangan work from anywhere menuju smart office). Aplikasi ini sebagai media untuk mempermudah pendaftaran nomor, perekaman, serta penyimpanan arsip surat (Surat Masuk, Keluar, Surat Tugas, dan SPPD) menuju era WFA yang mengusung gagasan FWS. Keberadaan DRSapp menjadi penting dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pegawai.
38	KOTA BLITAR	E-dakin. Merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang difungsikan untuk membantu melakukan integrasi pengelolaan data kinerja di BPS Kota Blitar. Aplikasi ini merupakan sistem yang mengakomodir keterpaduan dan integrasi data kinerja yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder data kinerja BPS Kota Blitar

No.	Nama Satker/Unit Kerja	Inovasi
(1)	(2)	(3)
		(sesuai dengan kewenangannya) namun dengan memperhatikan sekuritas data yang dihimpun di dalamnya.
39	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Aladin trabas (aplikasi perjalanan dinas - transparan akuntabilitas)
40	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Mendaki rinjani (mendulang kinerja dengan monitoring kinerja online)
41	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Modal nekat (monitoring dan evaluasi untuk ntb berkualitas)
42	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rasa pedas (telegram messaging untuk pelayanan data statistik online)
43	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Portal bps provinsi kalimantan barat. Suatu pusat media kerja yang terintegrasi sebagai wadah untuk terus bersinergi dan berkolaborasi. Portal ini terdiri dari sistem informasi mengenai kepegawaian, monitoring kinerja, keuangan, jurnal FORMASI BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan kegiatan-kegiatan besar (sensus) yang dilaksanakan BPS.
44	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Sistem contact center pelayanan statistik (sicantik)
45	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Psbb pojok statistik, akselerator pembangunan statistik perbatasan indonesia
46	KAB. KEPULAUAN TALAUD	SIPETIK. SIPETIK atau Sistem Pelayanan Statistik adalah aplikasi android yang menampilkan produk Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Data-data yang telah diunduh dapat dibuka tanpa harus menggunakan koneksi internet. Namun beberapa menu tetap memerlukan koneksi internet saat akan digunakan.
47	KAB. PINRANG	Molasap (media online pelayanan statistik via whatsapp) bps kabupaten pinrang, terobosan baru pelayanan statistik yang penuh adaptasi
48	KAB. BOALEMO	Sibolap (statistik boalemo via whatsapp): optimalisasi pelayanan statistik terpadu digital berbasis whatsapp business
49	PROVINSI MALUKU UTARA	Waw sista - whatsapp virtual assistant bps provinsi maluku utara. WAW SISTA adalah robot WhatsApp yang secara otomatis melayani pengguna layanan statstik BPS Provinsi Maluku Utara, terintegrasi dengan aplikasi backend monitoring untuk melihat apakah robot sudah bisa memenuhi pengguna layanan atau memerlukan intervensi operator.

Lampiran 13.

Dokumentasi Prestasi BPS Tahun 2022

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan meraih Peringkat Pertama Kategori Pelayanan Prima Kementerian Lembaga Umum dari Kementerian PANRB

Sebanyak 6 Satuan Kerja (satker) Badan Pusat Statistik (BPS) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2022

Integrated Collection System BPS meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik cluster Lembaga.

BPS menerima Anugerah Meritokrasi dengan predikat "Sangat Baik" dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

BPS meraih Penghargaan Terbaik Ketiga dalam *Indonesia's SDGs Action Awards* 2022 Kategori Kementerian/Lembaga

BPS Raih Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman

BPS Raih Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman

Kepala BPS meraih Piala Adicita Sewaka Pertiwi dari KemenPAN dan RB.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021.

BPS Provinsi Sumatera Barat mendapat penghargaan dari Wali Kota Padang Panjang dalam menyukseskan pencanangan Padang Panjang menuju Kota Statistik dan Kelurahan CANTIK (Cinta Statistik).

BPS Kota Denpasar meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.

BPS Kabupaten Kotawaringin Barat meraih penghargaan atas kontribusinya pada Penyediaan Data Statistik Berkualitas untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari Kepala BPPD setempat.

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta - 10710
(021) 3841195, 3842508, 3810291-4
(021)3857046
bpshq@bps.go.id
www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK